



LAPORAN KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
**BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA**
Jl. Parasamya No.16, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 868315
www.kemendesa.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2023 Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPM) Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai wujud penerapan diantaranya Peraturan Menteri Desa PDTT No. 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa PDTT yang mengharuskan setiap penyelenggaraan lembaga / instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam memberikan manfaat yang secara langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*) dapat dirasakan masyarakat Indonesia.

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang telah dijabarkan melalui program kerja dan kegiatan serta telah dilaksanakan, maka Laporan Kinerja BBPPM Yogyakarta perlu disusun. Akuntabilitas kinerja pada prinsipnya merupakan perwujudan kewajiban dari suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran secara periodik yang diukur dalam seperangkat indikator kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan media pertanggungjawaban BBPPM Yogyakarta dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang dirangkum untuk tujuan pencapaian visi.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu laporan yang perlu dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban rencana kerja, yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2023, dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai *feedback* yang berharga dalam memperbaiki kinerja BBPPM Yogyakarta di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 BBPPM Yogyakarta ini disusun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, Desember 2023
Kepala
Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Yogyakarta,



Dr. Ir. Widarjanto, M.M.
NIP. 19690303 199312 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPM) Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM). BBPPM Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat khususnya masyarakat desa, daerah tertinggal, dan calon transmigran juga tidak terlepas dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia yaitu pegawai dan penggerak swadaya masyarakat / tenaga pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang menjadi ujung tombak pelatihan.

Dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dan agar visi maupun misi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka kebijakan BBPPM Yogyakarta yang dilakukan adalah terwujudnya pelatihan masyarakat yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta penduduk sekitar guna mendukung percontohan, pengembangan dan pemberdayaan pelatihan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan Renstra BBPPM Yogyakarta. Renstra BBPPM Yogyakarta dijadikan dasar dalam melakukan pengukuran capaian kinerja yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA BBPPM YOGYAKARTA TAHUN 2023

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	Satuan	%
1	Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	780	Orang	780	Orang	100
2	Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	36	Orang	20	Orang	55,56
		Jumlah Masyarakat Desa yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	204	Orang	230	Orang	112,75
3	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan melalui Pendampingan	Jumlah lembaga/desa yang mendapat fasilitasi dan pemberdayaan melalui pendampingan	3	Lembaga/ Desa	42	Lembaga/ Desa	1400
4	Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	85	Persen	88,42	Persen	104,02
5	Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	0	Desa	3	Desa	300

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	Satuan	%
6	Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPM Yogyakarta dalam satu tahun	12	Dokumen	12	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Dokumen	4	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	23	Dokumen	23	Dokumen	100
		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPM Yogyakarta	90	Persen	95,38	Persen	105,98
7	Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPM Yogyakarta atas pelayanan dukungan manajemen	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	Bulan	12	Bulan	100
		Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75	Persen	80	Persen	100
		Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan	12	Bulan	100
		Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan	12	Bulan	100

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 yang dibiayai oleh DIPA Reguler BBPPM Yogyakarta sebesar Rp. 14.987.633.000,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). Adapun realisasi anggaran pada Tahun 2023 mencapai Rp. 14.984.812.413,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh

Empat Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribuan Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) atau sebesar 99,98% dengan persentase pencapaian fisik sebesar 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	12
C. Aspek Strategis	14
D. Isu Strategis	16
E. Struktur Organisasi	18
F. Sistematika Penyajian	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis BBPPM Yogyakarta.....	20
B. Perencanaan Program dan Kegiatan	28
C. Rencana Kinerja Tahunan 2023.....	30
D. Penetapan Kinerja Tahun 2023	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	42
B. Kinerja Anggaran	72
BAB IV PENUTUP	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Personil Berdasarkan Pendidikan	14
Tabel 2	Personil Berdasarkan Golongan	14
Tabel 3	Personil Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 4	Sarana dan Prasarana	15
Tabel 5	Isu Strategis BBPPM Yogyakarta	17
Tabel 6	Rencana Strategis BBPPM Yogyakarta Tahun 2020 – 2024	20
Tabel 7	Rencana Kinerja Tahunan	33
Tabel 8	Penetapan Kinerja BBPPM Yogyakarta Tahun 2023.....	35
Tabel 9	Matriks Kronologi DIPA BBPPM Yogyakarta TA 2023	38
Tabel 10	Pengukuran Kinerja BBPPM Yogyakarta Tahun 2023.....	46
Tabel 11	Pelaksanaan Pendampingan Tahun 2023	56
Tabel 12	Laporan Progres Pengisian Kuesioner Penyebarluasan Informasi Hasil Pelatihan	58
Tabel 13	Tabel kinerja anggaran berdasarkan IKU	76
Tabel 14	Tabel perbandingan target dan realisasi kinerja anggaran	77
Tabel 15	Perbandingan target dan realisasi kinerja dengan target yang tercantum dalam Renstra BBPPM Yogyakarta Tahun 2020 – 2023	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BBPPM Yogyakarta.....	18
Gambar 2. Indikator Pelaksanaan Anggaran BBPPM Yogyakarta Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2023	61
Gambar 3. Grafik Perbandingan target dan realisasi kinerja anggaran BBPPM Yogyakarta Tahun 2023	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BBPPM) Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021 – 2024 yang memuat Penyelenggaraan pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam RPJM Tahun 2021 - 2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah secara makro dalam mengurangi kesenjangan. Akan tetapi dalam skala mikro pembangunan wilayah perdesaan adalah tetap dalam rangka pertumbuhan dan penurunan kesenjangan wilayah. Apalagi akibat adanya pandemi Covid - 19 ini untuk pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur perekonomian Indonesia sumber pertumbuhannya dan motor penggeraknya adalah perdesaan. Pandemi Covid - 19 menyebabkan negara - negara lebih berorientasi untuk memperbaiki kondisi negaranya (*inward looking*) daripada untuk berinvestasi.

Oleh karena itu kebijakan pembangunan perdesaan ke depan menggunakan model pembangunan perdesaan neo-endogen (*neo-endogenous rural development model*), yaitu pembangunan perdesaan lebih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perdesaan dengan tetap memperhatikan adanya transfer dan subsidi serta investasi. Kebijakan juga diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi di perdesaan dan menumbuhkan pebisnis pemula (*start up business*) di perdesaan, khususnya kaum muda dan milenial.

Arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau ***Sustainable Development Goals (SDGs)*** yaitu kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Secara khusus agenda agenda pembangunan nasional mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan termasuk dalam tujuan SDGs ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan desa, Kawasan perdesaan, Kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada Tahun 2021-2024 telah merumuskan **SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa**, yaitu ditetapkannya 18 tujuan pembangunan Desa, meliputi; (1) Desa tanpa kemiskinan; (2) Desa tanpa kelaparan; (3) Desa sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan Desa berkualitas; (5) Keterlibatan perempuan desa; (6) Desa layak air

bersih dan sanitasi; (7) Desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) Pertumbuhan ekonomi desa merata; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) Desa tanpa kesenjangan; (11) Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman; (12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) Desa tanggap perubahan iklim; (14) Desa peduli lingkungan laut; (15) Desa peduli lingkungan darat; (16) Desa damai berkeadilan; (17) Kemitraan untuk pembangunan desa; (18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Ini sejalan dengan SDGs Desa ke 9 tentang infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, dimana SDGs Desa menekankan lahirnya inovasi di desa dalam semua bidang, seperti ekonomi, pelayanan publik, serta produk-produk unggulan desa dengan indikator pertumbuhan industri di desa serta kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi desa. SDGs Desa mensyaratkan adanya kemitraan desa yang baik dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Kemitraan bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Semua sektor perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi. Hal ini bisa diukur dari keberadaan dan bentuk kerja sama desa dengan pihak ketiga, ketersediaan jaringan internet di desa, statistik desa secara komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BBPPM Yogyakarta mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

BBPPM Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis pusat bidang pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSDM.

2. Tugas

BBPPM Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3. Fungsi

BBPPM Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Balai Besar.

C. Aspek Strategis

1. Dukungan Personil

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPPM Yogyakarta pada tahun 2023 ini didukung oleh personil sebanyak 88 orang pegawai, PNS sebanyak 50 orang pegawai dan Non PNS sebanyak 38 orang pegawai. Rincian pegawai PNS seperti Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Personil Berdasarkan Pendidikan

NO	BAGIAN/ BIDANG	PENDIDIKAN								JUMLAH (orang)
		S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Tata Usaha	1	4	9	0	3	2	0	0	19
2.	PSM	-	6	16	1	0	0	0	0	23
3.	Pranata Komputer	-	-	1	-	1	-	-	-	2
4.	Arsiparis	-	-	-	-	2	-	-	-	2
5.	Analisis Kebijakan	-	1	1	-	-	-	-	-	2
6.	Pengelola Pengadaan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
7.	Barang/ Jasa Analisis Pengelola Keuangan APBN	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		1	12	28	1	6	2	0	0	50

Tabel 2. Personil Berdasarkan Golongan

NO	BAGIAN/BIDANG	GOL				JUMLAH (orang)
		IV	III	II	I	
1.	Tata Usaha	1	15	3	-	19
2.	PSM	11	12	-	-	23
3.	Pranata Komputer	-	2	-	-	2
4.	Arsiparis	-	1	1	-	2
5.	Analisis Kebijakan	1	1	-	-	2
6.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	-	1	-	-	1
7.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	-	1	-	-	1
Jumlah		13	33	4	-	50

Tabel 3. Personil Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH KELAMIN		JUMLAH (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Tata Usaha	11	8	19
2.	PSM	11	12	23
3.	Pranata Komputer	1	1	2
4.	Arsiparis	1	1	2
5.	Analisis Kebijakan	2	0	2
6.	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa	1	0	1
7.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	0	1	1
		26	24	50

2. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh BBPPM Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH
I	GEDUNG KANTOR BBPPM	
1	Ruang Kerja Pimpinan /Ka. Balai Besar	1 lokal
2	Ruang Rapat Pimpinan Ka. Balai Besar	1 lokal
3	Ruang Kerja Kepala Bagian	1 lokal
4	Ruang Kerja Kepala Subbagian	2 lokal
5	Ruang Kerja Pelaksana	3 lokal
6	Ruang Kerja PSM Ahli Madya	1 lokal
7	Ruang Kerja PSM Ahli Muda	1 lokal
8	Ruang Kerja PSM Ahli Pertama	1 lokal
9	Ruang Rapat	1 lokal
10	Ruang Perpustakaan	1 lokal
II	GEDUNG TEMPAT PELATIHAN	
1	Ruang Aula	2 lokal
2	Ruang Kesehatan	1 lokal
3	Ruang Kelas	3 lokal
4	Klinik BUM Desa	1 lokal
III	FASILITAS PENDUKUNG	
1	Asrama peserta kapasitas 42 kamar	3 lokal

NO	URAIAN	JUMLAH
2	Ruang Dapur	1 lokal
3	Ruang Gudang	1 lokal
4	Ruang Petugas	1 lokal
5	Rumah Contoh Transmigran	1 lokal
6	Mushola	1 lokal
7	Pos Jaga	1 lokal
8	Rumah Kumbung Jamur	1 lokal
9	<i>Screen House</i>	1 lokal
10	Rumah Dinas Ka. Balai	1 lokal
11	Rumah Dinas Pejabat	3 lokal
12	Garasi	2 lokal
13	Ruang Laktasi	1 lokal
IV	KEBUN PRAKTIK	
1	Lahan Praktik Karang Tumaritis	1 lokasi
2	Lahan Praktik Karang Kadempel	1 lokasi
V	KENDARAAN OPERASIONAL	
1	Roda 4	6 unit
2	Roda 3	2 unit
3	Roda 2	16 unit
VI	PRASARANA	
1	LCD Proyektor	23 unit
2	Videotron	1 unit
3	Komputer	33 unit
4	Laptop	27 unit
5	Netbook	6 unit
6	Printer	42 unit
7	Scanner	4 unit
8	Fax	1 Unit
9	AC Spilt	104 unit
10	Mesin Ketik	7 Unit
11	Kipas Angin	50 Unit
12	Pompa Air	3 Unit
13	Genset 75 KVa	1 Unit

D. Isu Strategis

Isu strategis BBPPM Yogyakarta dari aspek Tata Kelola/ Manajemen, Pengembangan, Pelatihan, dan Pendampingan, serta Model Pendampingan dan Pendampingan Masyarakat adalah sebagai berikut :

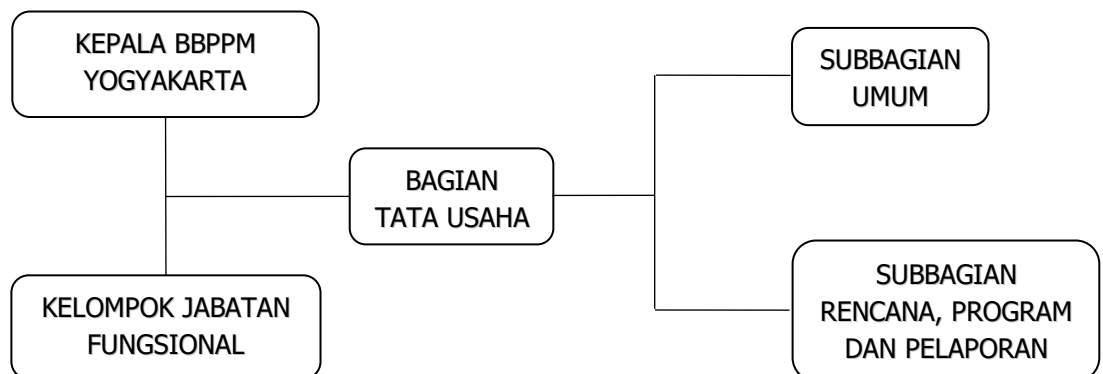
Tabel 5. Isu Strategis BBPPM Yogyakarta

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Manajemen	<p>a. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang ada belum melaksanakan tugas yang sesuai dengan tingkat jabatannya sebagaimana yang telah diatur pada Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2018</p> <p>b. Dukungan Anggaran Operasional (74%) mendominasi dukungan program pelatihan (26%)</p> <p>c. Pengelolaan kinerja pegawai menggunakan mekanisme tim kerja sesuai PERMENPANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi.</p>
2.	Pengembangan	<p>a. Belum adanya Juklak/Juknis pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan dan uji terap model pemberdayaan masyarakat</p> <p>b. Belum adanya petunjuk teknis terkait bidang kekhususan cakupan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dan produk masyarakat yang dilaksanakan oleh Balai Besar Yogyakarta</p> <p>c. Belum adanya pedoman terkait pelaksanaan tuisi Balai dibidang uji terap pemanfaatan TTG dan teknologi digital</p> <p>d. Belum adanya pedoman yang mengatur prosentase intervensi pusat terkait lokus penyelenggaraan pelatihan</p> <p>e. Belum adanya pedoman yang mengatur tentang satu rangkaian lokus pelatihan yang mendapatkan <i>treatment 3In One</i> (Pelatihan, Pendampingan, dan Pemberdayaan) serta durasi pendampingan yang dilakukan oleh Balai sehingga Balai dapat mengetahui secara signifikan terhadap keberhasilan program yang diberikan</p> <p>f. Belum adanya sistem/aplikasi yang mengatur mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital</p>

3.	Pelatihan, Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. Lokus penyelenggaraan pelatihan terbatas pada 35 angkatan namun hanya bisa dilaksanakan sebanyak 15 angkatan (20 angkatan terkena <i>Automatic Adjustment</i> (AA) dengan sumber data berdasarkan bantuan UKE-1 Kementerian dan tahun sebelumnya yang belum tersentuh pelatihan. Namun pada bulan Agustus 2023 telah dilakukan buka blokir terhadap pelatihan tersebut, sehingga sampai dengan akhir Desember 2023 dapat terlaksana sebanyak 35 pelatihan.</p> <p>b. Penetapan mekanisme tim kerja dalam pelatihan perlu disinergikan kembali mengingat mekanisme tersebut menjadi budaya kerja baru di lingkungan birokrasi pasca penyetaraan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional dengan mengedepankan kualitas kinerja pegawai dan penerapan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2021</p>
----	---	--

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPPM Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, BBPPM Yogyakarta adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPPM Yogyakarta

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas rencana strategis maupun rencana tahunan yang telah disusun serta sebagai mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Laporan Kinerja merupakan deskripsi dari kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode tahun anggaran. Sistematika penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Desa PDTT No. 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa PDTT adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara singkat tentang organisasi (Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Aspek Strategis, Isu Strategis, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian)

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara singkat dokumen perencanaan dan perjanjian kerja yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran yang meliputi Renstra dan penetapan kinerja

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan mengenai hasil pengukuran pencapaian target kinerja dan analisa capaian kinerja, termasuk keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah tindak lanjut

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan dari Laporan Kinerja dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada berikutnya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis BBPPM Yogyakarta

Tabel 6. Rencana Strategis BBPPM Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis BBPPM Yogyakarta	Indikator Kinerja BBPPM Yogyakarta		2020		2021		2022		2023		2024	
Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat	120	Org	1.815	Org	1.830	Org	1.830	Org	1.650	Org
Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	2	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat	60	Org	685	Org	270	Org	270	Org	240	Org
	3	Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023										
	4	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitas dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan										
Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan Melalui Pendampingan	5	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	0	%	0	%	0	%	85,00	%	85,00	%

Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan	0	desa	0	desa	0	desa	0	desa	0	desa
Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	7	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPM Yogyakarta dalam satu tahun	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln	12	bln
Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	8	Jumlah Dokumen perencanaan	5	pkt	4	pkt	4	pkt	4	pkt	4	pkt
	9	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	23	pkt	23	pkt	23	pkt	23	pkt	23	pkt
	10	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPM Yogyakarta	0	%	0	%	90	%	90,00	%	90,00	%
	11	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln
Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPM Yogyakarta atas pelayanan dukungan manajemen	12	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75,00	%	75,00	%	75,00	%	75,00	%	75,00	%
	13	Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln
	14	Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln	12	Bln

Rincian program dan Kegiatan BBPPM Yogyakarta serta Indikator Kinerja Kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang Dilatih dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di UPT Balai

Indikator Kinerja Kegiatan:

- ✓ Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terbentuk melalui pelatihan
- ✓ Jumlah Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diberikan Pelatihan

2. Peningkatan Kapasitas PSM BBPPM Yogyakarta

Indikator Kinerja Kegiatan:

- ✓ Jumlah PSM yang mendapatkan peningkatan kapasitas pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat desa

3. Uji Terap Model Pelatihan, pemberdayaan, dan pendampingan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Indikator Kinerja Kegiatan:

- ✓ Pelaksanaan uji terap pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan produk
- ✓ Pelaksanaan uji terap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Teknologi Tinggi, dan Teknologi Digital

4. Terselenggaranya program Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja Kegiatan:

- ✓ Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan BBPPM Yogyakarta
- ✓ Jumlah kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor BBPPM Yogyakarta

5. Terselenggaranya Layanan Perencanaan dan Penganggaran internal

Indikator Kinerja Kegiatan:

- ✓ Jumlah dokumen perencanaan program dan penyusunan rencana anggaran BBPPM Yogyakarta

- ✓ Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi
- ✓ Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
- ✓ Jumlah kegiatan pengelolaan kepegawaian
- ✓ Jumlah layanan umum, layanan rumah tangga dan perlengkapan BBPPM Yogyakarta

Rencana strategis BBPPM Yogyakarta mendukung arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, serta arah kebijakan dan strategi BPSDM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:

1. Pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, kemandirian, dan daya saing masyarakat;
2. Pelatihan yang diselenggarakan terdiri dari 3 macam yaitu :
 - a. Pelatihan ekonomi kreatif merupakan spesifikasi khusus dari BBPPM Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Permendes Nomor 23 Tahun 2020;
 - b. Pelatihan yang masuk dalam Rencana Aksi Nasional meliputi : Pelatihan Calon Transmigran dan Rencana Aksi Sinergitas Penanggulangan Terorisme yang bekerjasama dengan BPNT;
 - c. Pelatihan mendukung pemulihan ekonomi nasional meliputi: Pelatihan Pengelolaan BUM Desa dan Pelatihan Pembangunan Desa Wisata.
3. Pendampingan alumni pelatihan, meliputi pemberian pelayanan fungsional dalam fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
4. Penerapan model pendampingan dan pemberdayaan, meliputi pemberian pelayanan fungsional dalam penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

5. Peserta pelatihan meliputi Pengelola BUM Desa, kader desa, masyarakat desa, dan calon transmigrasi;
6. Pelatihan aparatur SDM;
7. Pengembangan kerja sama antar *stakeholder* baik dengan instansi pemerintah maupun swasta serta dengan pihak universitas maupun perbankan;
8. Menjalani hubungan dengan pusat maupun daerah agar lebih sinergis;

VISI

Berdasarkan tugas dan fungsinya maka visi BBPPM Yogyakarta adalah:

“Sebagai Pusat Percontohan (Center of Excellent), Pusat Pengembangan (Center Of Development) dan Pusat Pemberdayaan (Center Of Empowerment)”.

Pengertian dari visi tersebut adalah :

1. Pusat Percontohan dalam arti Metodologi Pelatihan maupun Budidaya pada area *Demonstration Plotting* (Demplot) dapat dicontoh oleh instansi lain baik pemerintah maupun swasta melalui pembelajaran singkat ataupun studi banding di BBPPM Yogyakarta;
2. Pusat Pengembangan dalam arti BBPPM Yogyakarta selaku Balai Pelatihan masyarakat desa akan senantiasa terus menerus dalam upaya meningkatkan kapasitas tenaga pelatih (PSM) maupun uji coba variasi budidaya baru bidang pertanian, perikanan, dan peternakan;
3. Pusat Pemberdayaan dalam arti BBPPM Yogyakarta akan senantiasa terus memberikan program pelatihan pemberdayaan melalui pelatihan baik terhadap kader desa maupun masyarakat desa.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dijalankan BBPPM Yogyakarta adalah:

1. Mendukung terlaksananya kebijakan dan program di bidang Pelatihan, Pemberdayaan, dan Pendampingan sumber daya manusia serta penerapan model pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
2. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kredibilitas lembaga pelatihan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (sumber daya pelatih) yang handal;
3. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kredibilitas lembaga pelatihan dalam rangka menyiapkan masyarakat desa, masyarakat daerah tertinggal dan transmigran yang produktif, terampil, dan mandiri;
4. Mendukung terbentuknya Pendamping Lokal Desa yang mampu mengawal kader Desa dalam pengembangan potensi desa;
5. Mendukung terbentuknya kader masyarakat desa;
6. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan produktivitas pegawai internal;
7. Mewujudkan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi menuju SDGs Desa; dan
8. Meningkatkan produktivitas masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Sesuai Visi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis; memiliki kewenangan penuh untuk mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa.

BBPPM Yogyakarta bertekad mengawal implementasi UU Desa dengan fokus pada misi kedua yaitu meningkatkan kapasitas, kualitas dan kredibilitas lembaga pelatihan dalam rangka menyiapkan masyarakat desa, masyarakat daerah tertinggal dan transmigran yang produktif, terampil, dan mandiri; misi ketiga yaitu mendukung terbentuknya kader masyarakat desa; serta misi kelima yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Nilai-Nilai Budaya Organisasi (APIK)

Dalam rangka mewujudkan etos kerja pegawai dilingkungan BBPPM Yogyakarta yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dan menjalankan tugas dan fungsi, diperlukan budaya kerja di lingkungan BBPPM Yogyakarta. Budaya kerja bertujuan untuk mendorong terbentuknya sikap dan perilaku sesuai dengan nilai budaya kerja pegawai BBPPM Yogyakarta berdasarkan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 15 Tahun 2019 tentang Budaya Kerja Pegawai Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdiri atas:

- 1. Akuntabel** : memiliki implikasi setiap pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing agar tercapai visi dan misi organisasi/Kementerian, serta bertugas mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- 2. Profesional** : memiliki implikasi setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dan mematuhi kode etik profesi untuk menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Kementerian;
- 3. Integritas** : memiliki implikasi setiap pegawai berkomitmen yang tinggi untuk menegakkan prinsip, nilai, dan norma social;
- 4. Kebersamaan** : memiliki implikasi setiap pegawai merasa menjadi bagian dari Kementerian dan bekerjasama untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi.

Nilai Budaya Kerja Akuntabel, Profesional, Integritas dan Kebersamaan atau yang disebut APIK wajib dijunjung tinggi oleh setiap pegawai BBPPM Yogyakarta, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari baik di dalam maupun di luar Kementerian.

Nilai-Nilai Budaya BPSDM

Nilai Budaya Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdiri atas : B (Berakhlak), I (Integritas), S (Smart), dan A (Akuntabel), selanjutnya disingkat BISA.

BISA merupakan Slogan yang memiliki pengertian :

- 1. B (Berakhlak)** : Bertingkah laku baik secara sadar dengan sepenuh hati dan tanpa paksaan;
- 2. I (Integritas)** : Konsisten dan penuh tanggung jawab, selaras antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan prinsip, nilai, serta norma sosial dan organisasi;
- 3. S (Smart)** : Berpikir dan bertindak secara cerdas dalam pekerjaan yang dilakukan melalui intuisi yang tajam, melalui kreativitas dan inovasi yang menghasilkan terobosan baru, melalui aksi-aksi yang impresif dan sesuai dengan aturan organisasi;
- 4. A (Akuntabel)** : Mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang telah dibuat dan sesuai aturan yang berlaku.

Nilai Budaya Pelayanan SEMAR

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta "kittah" adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang pada umumnya dalam keterbatasan.

Menyadari akan fungsinya maka didalam menjalankan pelayanan publik BBPPM Yogyakarta selalu berusaha melayani secara prima dengan semangat kerakyatan, persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat.

Dalam meanjalankan fungsi *public service* ini telah ditetapkan dalam sebuah ikon SEMAR yang merupakan singkatan dari :

1. **Simpat** : tampilan yang mampu menarik hati pihak lain.
2. **Empati** : kemampuan untuk bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain secara tulus
3. **Manusiawi** : kemampuan untuk bisa menghargai orang lain setara dengan harkat hidup manusia
4. **Akrab** : kemampuan untuk tampil secara fisik dengan ceria yang diwujudkan dalam perilaku dan tutur kata
5. **Ramah** : kemampuan untuk menumbuhkan suasana kedekatan perasaan dengan orang lain

Disamping penggunaan singkatan sebagai pedoman bersikap dari aparatur dalam melayani masyarakat, juga dilakukan pendekatan kultural dengan memasang ikon tokoh wayang "SEMAR" sebagai tipe ideal aparatur.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh BBPPM Yogyakarta dalam kurun waktu 2020-2024 adalah dengan menyelaraskan tujuan dari UKE 1 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam hal ini BPSDM.

Tujuan yang ingin dicapai BPSDM pada kurun 2020 – 2024 adalah:

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);

3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan Kawasan Perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta mendorong penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya Kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal.

Selaras dengan tujuan yang ingin dicapai BPSDM tersebut, BBPPM Yogyakarta pada kurun waktu 2021-2024 memiliki tujuan:

1. Pelaksanaan kegiatan dan program di bidang pelatihan masyarakat desa dan kader pemberdayaan masyarakat serta pendampingan bagi peningkatan produktivitas masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
2. Pelayanan belajar kilat di Balai baik untuk masyarakat umum, *diffabel*, mahasiswa, maupun pensiunan;
3. Pendampingan beberapa Bumdes yang ada di wilayah kerja menuju *e-market*;
4. Terwujudnya masyarakat calon transmigran yang berpengetahuan dan handal dalam menghadapi lahan pemukiman baru;
5. Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan yang unggul dan kreatif berwirausaha;
6. Peningkatan kompetensi SDM Balai (ASN) agar lebih produktif dan profesional;
7. Terwujudnya aparatur SDM pelatih yang bersertifikat, unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
8. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik, bersih, efektif, dan kredibel.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

BBPPM Yogyakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi per tahun kegiatan selama lima tahun berjalan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yakni sebagai berikut:

1. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023
2. Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023
3. Jumlah Masyarakat Desa yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023
4. Jumlah lembaga/desa yang mendapat fasilitasi dan pemberdayaan melalui pendampingan
5. Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat
6. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023
7. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPM Yogyakarta dalam satu tahun
8. Jumlah Dokumen Perencanaan
9. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan
10. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPM Yogyakarta
11. Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun
12. Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun

13. Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun
14. Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun

B. Perencanaan Program dan Kegiatan

Rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini adalah:

1. Pelatihan Bidang Sosial
 - a. Calon Transmigran yang Dilatih
 - b. Masyarakat desa, DTT yang dilatih berdasarkan kekhususan balai
 - c. Koordinasi dan kerjasama
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Balai
 - 1) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pembangunan Desa Wisata
 - e. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat
 - 1) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
 - 2) Pelatihan Pembangunan Desa Wisata
2. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
 - a. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa DTT
 - 1) Pengembangan/Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa DTT
 - i. Evaluasi dan Pendampingan Alumni Pelatihan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur

3. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pengadaan Alat Pengolah Data)
4. Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - 1) Organisasi dan Tata Laksana
 - i. Surveillance ISO 9001:2015
 - ii. Publikasi Pelatihan BBPPM Yogyakarta
 - 2) Reformasi Birokrasi
 - b. Layanan Umum dan Rumah Tangga
Layanan Pendukung Praktek Pelatihan
 - c. Layanan Perkantoran
 - 1) Gaji dan Tunjangan
 - 2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor)
6. Layanan Manajemen SDM (Pengelolaan kepegawaian)
7. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Rencana Program dan Anggaran
 - i. Program Kerja
 - ii. Renlakgiat
 - iii. RKAKL Tahun 2023
 - iv. Rencana Kerja Tahunan
 - b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Evaluasi dan Pelaporan (Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan/
LAPKIN, ZI Balai)
 - c. Layanan Manajemen Keuangan
Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan

C. Rencana Kinerja Tahunan 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa *output* dan indikator program berupa *outcome* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian.

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Pelatihan Bidang Sosial				
1	Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	36	Orang
		Jumlah Masyarakat Desa yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	204	Orang
		Jumlah Koordinasi dan kerjasama	1	Kegiatan
		Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Balai		
		- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	180	Orang
		- Pelatihan Pembangunan Desa Wisata	120	Orang
		Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat		
		- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	300	Orang
		- Pelatihan Pembangunan Desa Wisata	180	Orang
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				

2	Terlaksananya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa DTT	Jumlah Evaluasi dan Pendampingan Alumni Pelatihan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur	6	Kegiatan
Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
3	Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolah Data	Jumlah Alat Pengolah Data	16	Unit
Layanan Dukungan Manajemen Internal				
4	Terlaksananya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Laksana		
		- Surveilence ISO 9001:2015	1	Paket
		- Publikasi Pelatihan BBPPM Yogyakarta	1	Paket
		Jumlah Layanan Pendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	1	Paket
5	Terlaksananya Layanan Umum dan Rumah Tangga	Jumlah Layanan Pendukung Praktek Pelatihan	1	Layanan
6	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1	Layanan
		Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
7	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	Jumlah Peralatan Fasilitas Kantor	6	Unit
Layanan Manajemen SDM				
8	Terlaksananya Layanan Manajemen SDM	Jumlah Pengelolaan Kepegawaian		
		- Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur/ Pembinaan Kepegawaian	2	Paket
Layanan Manajemen Kinerja Internal				
9	Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Rencana Program dan Anggaran		
		- Program Kerja	1	Dokumen
		- Renlakgiat	1	Dokumen
		- RKAKL Tahun 2023	1	Dokumen
		- Rencana Kerja Tahunan	1	Dokumen
10	Terlaksananya Layanan	Jumlah Evaluasi dan Pelaporan		

	Pemantauan dan Evaluasi	- Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan/ LAPKIN, ZI Balai	23	Dokumen
11	Terlaksananya Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan	12	Dokumen

D. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 8. Penetapan Kinerja BBPPM Yogyakarta Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1	Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	780	Orang
2	Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	36	Orang
		Jumlah Masyarakat Desa yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	204	Orang
3	Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan melalui Pendampingan	Jumlah lembaga/desa yang mendapat fasilitas dan pemberdayaan melalui pendampingan	3	Lembaga/ Desa

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
4	Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	85	Persen
5	Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	0	Desa
6	Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPM Yogyakarta dalam satu tahun	12	Dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Dokumen
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	23	Dokumen
		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPM Yogyakarta	90	Persen
7	Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPM Yogyakarta atas pelayanan dukungan manajemen	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	Bulan
		Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75	Persen
		Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan
		Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan

Penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 14.234.838.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). Namun pada bulan November mendapatkan tambahan anggaran dari BPSDM sebesar Rp. 752.795.000,- sehingga total anggaran BBPPM Yogyakarta Tahun 2023 sebesar Rp. 14.987.633.000,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

KRONOLOGI REVISI DIPA BBPPM YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 9. Matriks Kronologi DIPA BBPPM Yogyakarta TA 2023

NO/ DIPA KE-	DIPA	TANGGAL	JUMLAH PAGU	KETERANGAN
	DIPA AWAL	17 November 2022	14,693,649,000	
1	DIPA REVISI KE-1 DJA	27 Desember 2022	14,693,649,000	Total blokir AA1 sebesar 2.453.277.000 (belanja pegawai/tukin 458.811.000; belanja non pegawai 1.994.466.000)
				Rincian pelatihan yang terkena AA1 : ekokraf 7 akt, bumdes di balai 2 akt, deswita di balai 4 akt, bumdes di lokasi 3 akt, deswita di lokasi 4 akt sehingga dari total 20 akt pelatihan tinggal 14 akt yang tidak terkena AA1
2	DIPA REVISI KE-2 KANWIL	9 Februari 2023	14,693,649,000	Perubahan pada anggaran masker pelatihan catrans sebesar 2.100.000 guna obat-obatan pelatihan
				Pergeseran pada rincian belanja gaji yang tidak mengubah pagu belanja 001
				Pengadaan fotocopy daftar gaji pada 002 yang diambil dari kegiatan perjadin koordinasi

3	DIPA REVISI KE-3 KANWIL	13 April 2023	14,693,649,000	Perubahan pada anggaran pembayaran gaji dan tunjangan 001 sesuai dengan perkiraan pembayaran sampai dengan akhir tahun 2023 (karena adanya minus gaji)
				Penambahan alokasi anggaran guna pelatihan kepemimpinan yang diambil dari belanja perjalanan dinas 002
4	DIPA REVISI KE-4 DJA	20 Mei 2023	14,693,649,000	Perubahan capaian alumni pada pelatihan calon transmigran dari 36 orang menjadi 7 orang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi nomor 226 Tahun 2022 tentang Program Penempatan Transmigran Tahun 2023
				Pergeseran anggaran dari pelatihan catrans ke pelatihan ekowisata dengan output 29 orang peserta pelatihan sebesar Rp 52.125.000,-
				Pergeseran output pelatihan dan optimalisasi sisa anggaran belanja modal untuk menambah kebutuhan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi serta sarana internal dalam rangka mendukung BBPPM Yogyakarta menuju WBBM
5	DIPA REVISI KE-5	4 Juli 2023	14,693,649,000	Pergeseran anggaran pada belanja operasional dan pemeliharaan kantor 002 yang tidak mengubah keseluruhan anggaran RO guna mendukung kegiatan Go BUM Desa

				Pemutakiran POK dan RPD (Rencana Penarikan Dana) Halaman III DIPA
				Pergeseran anggaran pada Gaji dan Tunjangan pegawai 001
6	DIPA REVISI Ke-6	18 Juli 2023	14,234,838,000	Penarikan blokir anggaran pada biaya tunjangan kinerja pegawai ke BUN sebesar Rp 458.811.000,- sehingga Pagu Alokasi BBPPM Yogyakarta berkurang dari Rp 14.693.649.000,- menjadi Rp 14.234.838.000,-
7	DIPA REVISI Ke-7	15 Agustus 2023	14,234,838,000	Buka Blokir Automatic Adjustment Tahap I sebesar Rp 1.580.000.000,- (17 akt pelatihan dan 1 kegiatan EPP)
8	DIPA REVISI Ke-8	21 Agustus 2023	14,234,838,000	Penambahan capaian volume alumni pelatihan catrans sebanyak 10 orang sehingga total menjadi 17 alumni pelatihan catrans serta penambahan anggaran obat-obatan untuk pelatihan sebanyak 2 AKT
				Pergeseran anggaran dalam Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang tidak mengubah Pagu RO Layanan Perkantoran yakni pada anggaran biaya pemeliharaan gedung kantor, perawatan prasarana kantor, pemeliharaan kendaraan roda 4 serta operasional perkantoran dan pimpinan
9	DIPA REVISI Ke-9	5 September 2023	14,234,838,000	Buka Blokir Automatic Adjustment Tahap II sebesar Rp 414.466.000 pada Pelatihan Ekokraf 3 akt dan 5 kegiatan EPP

10	DIPA REVISI Ke-10 KANWIL	5 Oktober 2023	14,234,838,000	Penambahan sebanyak 3 KK calon transmigran yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa PDTT RI Nomor 179 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2022 tentang Program Penempatan Transmigran Tahun 2023
				Penambahan output pelatihan semula 1030 orang menjadi 1033 orang
				Pergeseran anggaran antar RO pada KRO Pelatihan Bidang Sosial
				Pergeseran anggaran antar Sub Komponen dalam KRO Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, adanya penambahan 3 kegiatan Penerapan Model Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur
				Perubahan anggaran pada Detail yang ada di Komponen 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan sesuai dengan realisasi dan perkiraan perhitungan hingga akhir tahun
				Perubahan anggaran pada Detail yang ada di Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor sesuai dengan realisasi dan perkiraan perhitungan hingga akhir tahun

11	DIPA REVISI Ke-11 DJA	2 November 2023	14,987,633,000	Perubahan capaian output alumni pelatihan dari 1033 menjadi 1030 orang dengan rincian 20 alumni catrans, 230 alumni pelatihan ekonomi kreatif, 300 alumni pelatihan di balai, dan 480 alumni pelatihan di lokasi jangkauan darat
				Penambahan Pagu Anggaran dari 005 sebesar Rp752.795.000,- pada KRO QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Rp365.215.000,- dan KRO EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 001 dan 002 sebesar Rp387.580.000,- (anggaran Gaji Pegawai pada detail Tunjangan Kinerja sebesar Rp 94.167.000,- dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp290.280.000,-)
12	SATKER REVISI KE-4	9 November 2023	14,987,633,000	Perubahan pada detail Pelatihan Pelatihan Pengembangam BUM Desa (tema pemasaran kreatif dan pengembangan produk)
				Penambahan anggaran pada Sub Komponen C Peningkatan Kinerja Aparatur Bidang Pelatihan pada RO Koordinasi dan Kerjasama 6467.DJC.024 sebesar Rp 179.100.000,-
				Perbaiki detail uang lembur dan uang makan lembur serta 002 operasional pemeliharaan kantor dengan tidak mengubah anggaran pada level Komponen 002
				Perubahan detail anggaran pada Sub Komponen Publikasi Pelatihan BBPPM Yogyakarta dan Evaluasi Pasca Pelatihan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY dengan tidak mengubah pagu Komponen

13	SATKER REVISI KE-5	10 November 2023	14,987,633,000	Pergeseran anggaran pada 002 Operasional Pemeliharaan Kantor yakni detail retribusi sampah, rumah tangga perkantoran dan pengiriman surat dinas
				Perubahan detail pada Sub Komponen C Peningkatan Kinerja Aparatur Bidang Pelatihan dalam RO Koordinasi dan Kerjasama
14	SATKER REVISI KE-6	10 November 2023	14,987,633,000	Pergeseran anggaran pada detail Sub Komponen Peningkatan Kinerja Aparatur Bidang Pelatihan pada RO 6467.DJC.024 Koordinasi dan Kerjasama dengan tidak mengubah jumlah anggaran Sub Komponen yakni sebesar Rp 175.720.000,-
15	SATKER REVISI KE-7	22 November 2023	14,987,633,000	Pergeseran dalam Komponen 051 Koordinasi dalam 6467.DJC.024 Koordinasi dan Kerjasama
				Penambahan anggaran pada detail jamuan tamu dan listrik. Pengurangan anggaran telepon dan internet, sewa hosting dan domain pada komponen 002 operasional dengan tidak mengubah jumlah anggaran
16	SATKER REVISI KE-8	25 November 2023	14,987,633,000	Penghapusan biaya sertifikat peserta pelatihan pengembangan BUM Desa (tema pemasaran kreatif dan pengembangan produk) sebesar Rp 1.620.000,- karena sertifikat dicetak melalui srikandi. Kemudian biaya tersebut berpindah ke transport pada 6467.DCJ.024.051
				Perubahan detail (spanduk dan honorarium narasumber) pada 6467.DCJ.024.C dengan tidak merubah anggaran pada Sub Komponen

				Pergeseran pada detail 6467.QDB.003.051.A dan 6467.QDB.003. 051.B dengan tidak mengubah jumlah anggaran dalam RO Pengembangan/Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa DTT
				Pergeseran pada 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor meliputi peralatan pelatihan, pemeliharaan genset, listrik)
17	SATKER REVISI KE-9	1 Desember 2023	14,987,633,000	Perubahan pada detail 6459.EBC.954.051.A Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur/Pembinaan Kepegawaian
18	DIPA REVISI Ke-12 KANWIL	14 Desember 2023	14,987,633,000	Pergeseran pada 001 Gaji dan Tunjangan (Gaji Pokok PNS, Uang Makan PNS, Uang Lembur dan Uang Makan PNS serta Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai)
19				Pergeseran pada 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor meliputi Perlengkapan Asrama, Biaya Lisensi Aplikasi Video Conference, Pemeliharaan Genset, Listrik, Telepon dan Internet dan Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan)
20	DIPA REVISI Ke-13 KANWIL	22 Desember 2023	14,987,633,000	Pergeseran pada 001 Gaji dan Tunjangan (Gaji Pokok PNS, Tunjangan Suami/Istri, Anak, PPh, Beras, Uang Makan,Umum, Belanja Lembur, Belanja Tunjangan Kinerja)
				Pergeseran pada 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor meliputi jamuan tamu, retribusi sampah, biaya pajak kendaraan, pemeliharaan pompa air dan genset, pengiriman surat dinas, belanja perjalanan dinas pimpinan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perencanaan kinerja sebagai proses penyusunan rencana kinerja yang penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditentukan dalam rencana strategik BBPPM Yogyakarta yang telah dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Dalam penentuan rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja dituangkan dalam Penetapan Kinerja BBPPM Yogyakarta Tahun 2023 yang dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi tercapainya kegiatan pada tahun berjalan.

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Data kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja BBPPM Yogyakarta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa PDTT. Ketentuan mengenai sistem pelaporan dimaksudkan untuk memperjelas ketersediaan materi laporan, waktu penyampaian laporan, penyusunan laporan, dan penanggung jawab laporan, sehingga laporan akan dimanfaatkan secara tepat dan akurat.

1. Capaian Kinerja BBPPM Yogyakarta

Indikator kinerja yang ada dilakukan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan BBPPM Yogyakarta Tahun 2023. Dengan mengacu pada indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian, yang digunakan untuk menilai capaian indikator kinerja suatu pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditentukan, dapat diketahui tingkat keberhasilan/kegagalan suatu pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tabel 10. Pengukuran Kinerja BBPPM Yogyakarta Tahun 2023

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	Satuan	%
1	Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	780	Orang	780	Orang	100
2	Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	36	Orang	20	Orang	55,56
		Jumlah Masyarakat Desa yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	204	Orang	230	Orang	112,75
3	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan melalui Pendampingan	Jumlah lembaga/desa yang mendapat fasilitasi dan pemberdayaan melalui pendampingan	3	Lembaga / Desa	42	Lembaga/ Desa	1400

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	Satuan	%
4	Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	85	Persen	88,42	Persen	104,02
5	Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	0	Desa	3	Desa	300
6	Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPM Yogyakarta dalam satu tahun	12	Dokumen	12	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Dokumen	4	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	23	Dokumen	23	Dokumen	100
		Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPM Yogyakarta	90	Persen	95,38	Persen	105,98
7	Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPM Yogyakarta atas pelayanan dukungan manajemen	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	Bulan	12	Bulan	100
		Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75	Persen	80	Persen	100

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	Satuan	%
		Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan	12	Bulan	100
		Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan	12	Bulan	100

Analisis hasil capaian kinerja pada tabel diatas dapat diambil faktor yang menjadi hambatan dan kendala serta upaya tindak lanjut adalah sebagai berikut :

Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator kinerja pertama dengan jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan target 780 orang diperoleh pencapaian target sebanyak 780 orang (100%), dengan rincian pelatihan sebagai berikut :

- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa bersama dilaksanakan di BBPPM Yogyakarta pada tanggal 27 Februari s.d. 02 Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari 13 Kabupaten, yaitu Banjarnegara, Purworejo, Pati, Demak, Magelang, Sleman, Bantul, Blitar, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Jombang, dan Banyuwangi.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan I dilaksanakan di Kabupaten Lumajang pada tanggal 06 s.d. 09 Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Desa Wisata Angkatan I dilaksanakan di Kabupaten Jember pada tanggal 07 s.d. 10 Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

- Pelatihan Desa Wisata Angkatan II dilaksanakan di Kabupaten Purworejo pada tanggal 07 s.d. 10 Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan III dilaksanakan di BBPPM Yogyakarta pada tanggal 14 s.d. 17 Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Grobogan, Blora, dan Pati.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan IV dilaksanakan di BBPPM Yogyakarta pada tanggal 14 s.d. 17 Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Banyumas dan Cilacap.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan II dilaksanakan di Kabupaten Kendal pada tanggal 16 s.d. 19 Maret 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan VI dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 – 11 Mei 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan V dilaksanakan di BBPPM Yogyakarta pada tanggal 9 – 12 Mei 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan VII dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung pada tanggal 22 - 25 Mei 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan VIII dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek pada tanggal 23 - 26 Mei 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan IX dilaksanakan di Kabupaten Madiun pada tanggal 5 – 8 Juni 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan X dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 6 - 9 Juni 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan III dilaksanakan di BBPPM Yogyakarta pada tanggal 4 – 7 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa bersama Angkatan II dilaksanakan di Kabupaten Ngawi pada tanggal 5 – 8 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan IV dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 5 – 8 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan XI dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 6 – 9 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan VI dilaksanakan di BBPPM Yogyakarta pada tanggal 11 – 14 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Kendal.
- Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan VII dilaksanakan di BBPPM Yogyakarta pada tanggal 11 – 14 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan XII dilaksanakan di Kabupaten Jombang pada tanggal 11 – 14 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan V dilaksanakan di Kabupaten Temanggung pada tanggal 12 – 15 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

- Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan VIII dilaksanakan di Kabupaten Jepara pada tanggal 12 – 15 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan IX dilaksanakan di Kabupaten Semarang pada tanggal 13 – 16 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan XIII dilaksanakan di BBPPM Yogyakarta pada tanggal 18 – 21 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Magetan dan Pacitan.
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan XIV dilaksanakan di BBPPM Yogyakarta pada tanggal 18 – 21 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Blitar dan Kediri.
- Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan X dilaksanakan di BBPPM Yogyakarta pada tanggal 18 – 21 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Karanganyar dan Sragen.

a. Hambatan dan kendala :

- 1) Proses penetapan peserta hanya dilaksanakan melalui Surat dan komunikasi telepon, tanpa koordinasi langsung ke Dinas Kabupaten. Hal ini menjadikan pihak Dinas Kabupaten kurang paham dan kurang teliti dalam memahami surat dari Balai sehingga persyaratan peserta yang diminta Balai kurang terpenuhi.
- 2) Penetapan mekanisme tim kerja sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2021 dalam pelatihan masih dalam tahap adaptasi cara kerja sehingga memerlukan waktu lebih

lama dalam pengerjaan. Selain itu dalam pembagian pekerjaan masih belum proporsional dalam satu tim.

- 3) Pada bulan Agustus 2023 melalui Kepala BPSDM disampaikan permohonan buka blokir *Automatic Adjustment* untuk 17 pelatihan. Namun baru tanggal 15 Agustus 2023 disahkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan pelaksanaan pelatihan mulai tanggal 28 Agustus, sehingga waktu yang diperlukan untuk koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten dan persiapan pelatihan hanya sedikit. Hal ini mengakibatkan terburu-buru dalam pelaksanaan pelatihan.

b. Upaya perbaikan :

- 1) Mengawali komunikasi dan koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten terlebih dahulu terkait dengan kesiapan peserta pelatihan.
- 2) Intensitas komunikasi lebih ditingkatkan agar tidak terjadi kekeliruan.
- 3) Perlunya koordinasi dalam satu tim kerja agar lebih solid dalam melaksanakan pelatihan.

Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa

Indikator kinerja pertama dengan jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Calon Transmigran dengan target 36 orang diperoleh pencapaian target sebanyak 20 orang (55,56%) jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Masyarakat Desa dengan target 204 orang diperoleh pencapaian target sebanyak 230 orang (112,75%) dengan rincian pelatihan sebagai berikut :

- Pelatihan PBK Calon Transmigran Angkatan II di BBPPM Yogyakarta tanggal 16 - 22 Oktober 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 13 orang yang berasal dari Kabupaten Purworejo,

Semarang, Sragen, Klaten, Cilacap, Kebumen, dan Kota Surakarta;

- Pelatihan PBK Calon Transmigran di BBPPM Yogyakarta tanggal 2 – 8 Agustus 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 7 orang yang berasal dari Kabupaten. Blora, Grobogan, Semarang, Kebumen, Batang, Demak, dan Ngawi;
- Pelatihan Ekowisata dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 14 – 17 Juni 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang.
- Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk (Eduwisata) Angkatan I di BBPPM Yogyakarta tanggal 28 – 31 Agustus 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Sleman;
- Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk Angkatan II di BBPPM Yogyakarta tanggal 28 – 31 Agustus 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Bangkalan;
- Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk Angkatan III di BBPPM Yogyakarta tanggal 28 – 31 Agustus 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Kebumen;
- Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk Angkatan IV di BBPPM Yogyakarta tanggal 4 – 7 September 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari Kabupaten Bantul.
- Pelatihan Pelatihan Pengembangan BUM Desa (Tema Pemasaran Kreatif dan Pengembangan Produk) Angkatan I di Kab. Bojonegoro tanggal 13 – 16 November 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 41 orang.

- Pelatihan Pelatihan Pengembangan BUM Desa (Tema Pemasaran Kreatif dan Pengembangan Produk) Angkatan I di Kab. Bojonegoro tanggal 13 – 16 November 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.

a. Hambatan dan kendala :

- 1) Pada bulan Agustus 2023 melalui Kepala BPSDM disampaikan permohonan buka blokir *Automatic Adjustment* untuk 17 pelatihan. Namun baru tanggal 15 Agustus 2023 disahkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan pelaksanaan pelatihan mulai tanggal 28 Agustus, sehingga waktu yang diperlukan untuk koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten dan persiapan pelatihan hanya sedikit. Hal ini mengakibatkan terburu-buru dalam pelaksanaan pelatihan.
- 2) Proses penetapan peserta hanya dilaksanakan melalui Surat dan komunikasi telepon, tanpa koordinasi langsung ke Dinas Kabupaten. Hal ini menjadikan pihak Dinas Kabupaten kurang paham dan kurang teliti dalam memahami surat dari Balai sehingga persyaratan peserta yang diminta Balai kurang terpenuhi.
- 3) Penetapan mekanisme tim kerja sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2021 dalam pelatihan masih dalam tahap adaptasi cara kerja sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam pengerjaan. Selain itu dalam pembagian pekerjaan masih belum proporsional dalam satu tim.
- 4) Perubahan capaian alumni pada pelatihan calon transmigran dari 36 orang menjadi 7 orang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 51 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi nomor 226 Tahun 2022 tentang Program Penempatan Transmigran Tahun 2023, namun pada bulan Agustus terdapat penambahan capaian volume alumni pelatihan catrans sebanyak 10 orang sehingga total menjadi 17 alumni pelatihan catrans serta penambahan anggaran obat-obatan untuk pelatihan sebanyak 2 AKT, dan terakhir pada bulan Oktober terdapat penambahan sebanyak 3 KK calon transmigran yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa PDTT RI Nomor 179 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2022 tentang Program Penempatan Transmigran Tahun 2023 sehingga total menjadi 20 orang alumni. Hal ini yang menyebabkan persentase capaian menjadi rendah.

- 5) Perubahan detail pada Pelatihan Pelatihan Pengembangam BUM Desa (Tema Pemasaran Kreatif dan Pengembangan Produk) terjadi di awal bulan November 2023 sehingga waktu yang diperlukan untuk koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten dan persiapan pelatihan hanya sedikit. Hal ini mengakibatkan terburu-buru dalam pelaksanaan pelatihan

b. Upaya perbaikan :

- 1) Mengawali komunikasi dan koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten terlebih dahulu terkait dengan kesiapan peserta pelatihan.
- 2) Intensitas komunikasi lebih ditingkatkan agar tidak terjadi kekeliruan.

- 3) Perlunya koordinasi dalam satu tim kerja agar lebih solid dalam melaksanakan pelatihan.

Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan melalui Pendampingan

Fasilitasi Pemberdayaan melalui Pendampingan ditargetkan tercapai 3 lembaga/desa diperoleh pencapaian sebanyak 42 lembaga/desa (1400%) dengan rincian sebagai berikut :

- Pendampingan Masyarakat sebanyak 36 lembaga/desa:

Tabel 11. Pelaksanaan Pendampingan Tahun 2023

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	KABUPATEN	DESA, KECAMATAN
1	Pendampingan Angkatan I	13 November 2023	Ponorogo	Nambak, Bungkal
				Bancar, Bungkal
				Bediwetan, Bungkal
2	Pendampingan Angkatan II	13 November 2023	Ponorogo	Gandu, Mlarak
				Ngrukem, Mlarak
				Joresan, Mlarak
3	Pendampingan Angkatan III	14 November 2023	Ngawi	Babadan, Pangkur
				Pohkonyal, Pangkur
				Pleset, Pangkur
4	Pendampingan Angkatan IV	14 November 2023	Ngawi	Tambakboyo, Mantingan
				Kedungharjo, Mantingan
				Pakah. Mantingan
5	Pendampingan Angkatan V	15 November 2023	Trenggalek	Kamulan, Durenan
				Pakis, Durenan
				Malasan, Durenan
6	Pendampingan Angkatan VI	15 November 2023	Trenggalek	Parakan, Trenggalek
				Tamanan, Trenggalek
				Ngares, Trenggalek
7	Pendampingan Angkatan VII	16 November 2023	Trenggalek	Bendorejo, Pogalan
				Pogalan, Pogalan
				Gembleb, Pogalan
8	Pendampingan Angkatan VIII	16 November 2023	Trenggalek	Nglongsor, Tugu
				Jambu, Tugu
				Ngepeh, Tugu

9	Pendampingan Angkatan IX	17 November 2023	Magetan	Sobontoro, Karas
				Sumursongo, Karas
				Jeruk, Kartoharjo
10	Pendampingan Angkatan X	18 November 2023	Magetan	Sendangagung, Plaosan
				Randugede, Plaosan
				Puntukdoro, Plaosan
11	Pendampingan Angkatan XI	18 November 2023	Magetan	Sumberdodol, Panekan
				Sumbersawit, Sidorejo
				Sambirobyong, Sidorejo
12	Pendampingan Angkatan XII	19 November 2023	Pacitan	Temon, Arjosari
				Gunungsari, Arjosari
				Tremas, Arjosari

- Evaluasi Pasca pelatihan sebanyak 6 lembaga/desa
 - Evaluasi Pasca Pelatihan Angkatan I di Desa Tamanagung, Kec. Muntilan, Kab. Magelang tanggal 3 s.d. 4 Oktober 2023;
 - Evaluasi Pasca Pelatihan Angkatan II di Desa Bulus, Kec. Gebang, Kab. Purworejo tanggal 10 s.d. 11 Oktober 2023;
 - Evaluasi Pasca Pelatihan Angkatan III di Desa Karagtengah, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk tanggal 10 s.d. 11 Oktober 2023;
 - Evaluasi Pasca Pelatihan Angkatan IV di Desa Girirejo, Kec. Ngablak, Kab. Magelang tanggal 13 s.d. 14 Oktober 2023;
 - Evaluasi Pasca Pelatihan Angkatan V di Kalurahan Jatirejo, Kapanewon Lendah, Kab. Kulon Progo tanggal 17 s.d. 18 Oktober 2023;
 - Evaluasi Pasca Pelatihan Angkatan VI di Desa Dukuh Dempok, Kec. Wuluhan, Kab. Jember tanggal 18 s.d. 19 Oktober 2023.

Terlaksananya Pendampingan Masyarakat Oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat oleh Alumni terkait dengan Penyebarluasan Hasil Pelatihan kepada pihak lain (non peserta). Pihak lain tersebut bisa ke Pengelola BUMDesa/ Deswita, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat pada umumnya yang berkepentingan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban alumni yang telah mengikuti pelatihan. Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat dengan target 85% tercapai 88,42% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12. Laporan Progres Pengisian Kuesioner Penyebarluasan Informasi Hasil Pelatihan

No	Nama Pelatihan	Jumlah Alumni	Pengisian Kuesioner		Pelaksanaan Penyebaran Informasi	
			Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan I Kab. Lumajang Tahun 2023	30	26	4	26	0
2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan II Kab Kendal Tahun 2023	30	30	0	30	0
3	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan III Tahun 2023	30	30	0	27	3
4	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan IV Tahun 2023	30	26	4	26	0
5	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa bersama Tahun 2023	30	28	2	27	1
6	Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan I Kab. Jember Tahun 2023	30	29	1	29	0
7	Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan II Kab. Purworejo Tahun 2023	30	29	1	28	1
8	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan VI Kab. Sidoarjo Tahun 2023	30	26	4	26	0
9	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan V Tahun 2023	30	20	10	16	4

10	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan VII Kab. Tulungagung Tahun 2023	30	30	0	30	0
11	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan VIII Kab. Trenggalek Tahun 2023	30	29	1	29	0
12	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan IX Kab. Madiun Tahun 2023	30	28	2	26	2
13	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan X Kab. Ponorogo Tahun 2023	30	22	8	22	0
14	Pelatihan Ekowisata Kab. Kulonprogo Tahun 2023	29	29	0	29	0
15	Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk Angkatan I Tahun 2023	30	26	4	26	0
16	Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk Angkatan II Tahun 2023	30	26	4	26	0
17	Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk Angkatan III Tahun 2023	30	26	4	26	0
18	Pelatihan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk Angkatan IV Tahun 2023	30	28	2	27	1
19	Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan III Tahun 2023	30	26	4	26	0
20	Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan IV Tahun 2023 Kab. Ponorogo	30	28	2	28	0
21	Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan V Kab. Temanggung Tahun 2023	30	30	0	30	0
22	Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan VI Tahun 2023	30	28	2	27	1
23	Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan VII Tahun 2023	30	30	0	28	2
24	Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan VIII Kab. Jepara Tahun 2023	30	27	3	27	0
25	Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan IX Kab. Semarang Tahun 2023	30	28	2	27	1
26	Pelatihan Pembangunan Desa Wisata Angkatan X Tahun 2023	30	30	0	30	0
27	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa bersama Angkatan II Kab. Ngawi Tahun 2023	30	30	0	30	0
28	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan XI Kab Nganjuk Tahun 2023	30	30	0	26	4
29	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan XII Kab Jombang Tahun 2023	30	28	2	28	0

30	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan XIII Tahun 2023	30	30	0	27	3
31	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan XIV Tahun 2023	30	26	4	26	0
32	Pelatihan Pengembangan BUM Desa Angkatan I Kab. Bojonegoro Tahun 2023	41	26	15	23	3
33	Pelatihan Pengembangan BUM Desa Angkatan II Kab. Bojonegoro Tahun 2023	40	37	3	34	3
	Jumlah	<u>1010</u>	<u>922</u>	<u>88</u>	<u>893</u>	<u>29</u>

Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023 ditargetkan sebanyak 0 desa, namun dapat terealisasi sebanyak 3 desa dalam penerapan model tahun 2023, sebagai berikut :

- i. Penerapan Model Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumberdodol, Kec. Panekan, Kab. Magetan tanggal 12 s.d. 13 Oktober 2023;
- ii. Penerapan Model Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ngampel, Kec. Bora, Kab. Bora tanggal 17 s.d. 18 Oktober 2023;
- iii. Penerapan Model Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pamotan, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan tanggal 19 s.d. 20 Oktober 2023;

Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen pendukung yang dimaksud dalam tahun anggaran 2023 dapat tercapai sesuai target sebesar 100%.

- Laporan Keuangan dan BMN yang disusun Tahun 2023 terealisasi sebanyak 12 dokumen
- Dokumen Evaluasi dan Pemantauan yang disusun Tahun 2023 terealisasi sebanyak 23 dokumen, yaitu Laporan Bulanan sebanyak 12 dokumen, Laporan Triwulan sebanyak 4 dokumen, dan Laporan Triwulan ZI sebanyak 4 dokumen, Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Tahunan Balai, dan Laporan Tahunan ZI sebanyak 3 dokumen.
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat tercapai sebesar 95,38 % melebihi target semula sebesar 90%. Hal ini membuktikan bahwa dari segi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil dari pelaksanaan anggaran BBPPM Yogyakarta Baik ($\geq 90\%$).

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	030	067	350482	BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	72.90	100.00	80.95	100.00	99.94	100.00	100.00	95.38	100%	95.38
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.29	20.00	8.10	10.00	9.99	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	86.45		96.18					100.00			

Gambar 2. Indikator Pelaksanaan Anggaran BBPPM Yogyakarta Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2023

Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPM Yogyakarta atas pelayanan dukungan manajemen

Indikator layanan dukungan manajemen internal dengan target 12 bulan dan diperoleh pencapaian target sebanyak 12 bulan (100%), yang terdiri dari :

- Layanan gaji dan tunjangan pegawai.
- Layanan pengelolaan kepegawaian yang meliputi usulan kenaikan pangkat pegawai, KGB pegawai, pengajuan uji kompetensi pegawai usulan pegawai teladan tiap bulan,

Lapkin Pegawai PNS dan PPNP, dan kegiatan Pembinaan Kepegawaian.

- Layanan persuratan dan pengelolaan arsip.
- Layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Hambatan dan kendala serta upaya tindak lanjut dalam mendukung pelayanan dukungan manajemen

a. Hambatan dan kendala :

Surat Keputusan (SK) pegawai, baik kenaikan pangkat, KGB, maupun SK pejabat Fungsional lainnya, terlambat turun dikarenakan mekanisme dan manajemen pengelolaan dari Biro Kepegawaian dan Organisasi yang belum dilaksanakan dengan baik, sehingga yang seharusnya dapat turun sebelum dan atau pada bulan berjalan akan turun terlambat.

b. Upaya perbaikan :

Telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat BPSDM dan Biro Kepegawaian dan Organisasi agar proses penerbitan SK dapat dikawal dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja sasaran yang didasarkan kepada capaian kinerja kegiatan, ternyata pencapaian sasaran – sasaran tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh BBPPM Yogyakarta dapat dicapai dengan total **100%**. Keberhasilan kinerja ini dapat tercapai karena adanya komitmen segenap unsur BBPPM Yogyakarta serta dukungan sumber daya manusia yang profesional.

2. Capaian Kinerja Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional dan Rencana Aksi Nasional (RAN)

Dalam rangka mendukung program pemerintah, yaitu Prioritas Nasional dan Rencana Aksi Nasional, Kementerian Desa PDTT

melalui BBPPM Yogyakarta turut serta dalam mendukung tersebut, yaitu dengan kegiatan pelatihan. Diantaranya adalah :

- a. Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional di BBPPM Yogyakarta : tidak ada
- b. Kegiatan yang mendukung Rencana Aksi Nasional yang masuk dalam Rencana Aksi Sinergitas Penanggulangan Terorisme yang bekerjasama dengan BPNT :
 - i. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan VI tanggal 8 – 11 Mei 2023 di Kab. Sidoarjo dengan peserta sebanyak 30 orang;
 - ii. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Angkatan V tanggal 9 – 12 Mei di BBPPM Yogyakarta dengan asal peserta dari Kab. Karanganyar dengan peserta sebanyak 10 orang.

3. Kegiatan Mandiri BBPPM Yogyakarta

Selain kegiatan yang dibiayai oleh APBN, BBPPM Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan mandiri yang tidak dibiayai oleh APBN. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan mandiri tanpa adanya biaya atau gratis maupun anggaran dari pihak ketiga (Dinas PMD Kabupaten, UPTD terkait, maupun pihak lain yang telah menjalin kerjasama/MoU dengan BBPPM Yogyakarta). Kegiatan ini melibatkan pegawai BBPPM Yogyakarta baik pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun pejabat fungsional lainnya. Kegiatan tersebut antara lain :

- a. Bulan Januari

No	Tanggal	Tempat	kegiatan	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	6 Januari - 6 Februari 2023	Desa Kalirejo, Desa Ngargogondo, Desa Trasan, Desa Sukosari Kab. Magelang	Pendampingan Mahasiswa KKN Untidar Pendataan Anak Tidak Sekolah	96 Mahasiswa	LPPM Untidar Magelang

2	9 Januari - 9 Februari 2023	Demplot karang Tumaritis BBPPM Yogyakarta	Pendampingan Mahasiswa PKL Unsoed terkait Aquaponik dan Hidroponik	6 Mahasis wa	BBPPM Yogyakarta
3	9 Januari - 17 Februari 2023	7 Padukuhan di Desa Margomulyo, Desa Margoagung Kec. Seyegan, Sleman	Pendampingan Mahasiswa KKN Tematik UST	85 Mahasis wa	LPPM UST
4	11 Januari 2023	BBPPM Yogyakarta	Kunjungan dan Evaluasi KKN UNY di BBPPM Yogyakarta	10 pegawai	PLS UNY
5	31 Januari 2023	Kalurahan Pandowoharjo, Sewon, Bantul	Desiminasi/ Sosialisasi (PP, Perkal) BUM Kal	10 orang	Pemkal Pandowoharjo

b. Bulan Februari

No	Tanggal	Tempat	kegiatan	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	1 Februari 2023	Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan	Narasumber Bimtek G2R Kabupaten Bantul		Pemerintah Kab. Bantul
2	2 Februari 2023	Demplot BBPPM Yogyakarta	Study Lapang bidang Agroteknopreneursip & Agribisnis	135 orang	Stiper Study Lapang STIPER Dharma Wacana Metro Lampung
3	2 Februari 2023	Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri	Narasumber Bimtek G2R Kabupaten Bantul		Pemerintah Kab. Bantul
4	6 Februari 2023	Kalurahan Sabdadadi, kapanewon Bantul	Narasumber Bimtek G2R Kabupaten Bantul		Pemerintah Kab. Bantul
5	7 Februari 2023	Hotel Pandanaran Yogyakarta	Narasumber Rapat kerja BUM Desa Kabupaten Bantul 2023		Dinas PMK Kab. Bantul
6	9 Februari 2023	Kelas D BBPPM Yogyakarta	Angkringan Reborn "Entaskan Kemiskinan Kab. Kulon Progo"		BBPPM Yogyakarta
7	9 Februari 2023	Kelas ABBPPM Yogyakarta	Go Ekspose Mahasiswa PKL Unsoed		BBPPM Yogyakarta

8	13 Februari 2023	Desa Tamanagung, Muntilan, Magelang	Evaluasi Program Sengkuyung 3 in One	30 orang	BBPPM Yogyakarta
9	13-15 Februari 2023	Ruang Rapat lt. 2 Biro Organisasi Setda DIY	Penilaian Angka Kredit PSM di Pemda DIY	23 orang	Pemerintah DIY
10	14 Februari 2023	Padukuhan Daplokan, Margomulyo, Sleman	Penyuluhan Kebun Bergizi Sinergi KKN UST Yogyakarta		KKN UST Yogyakarta
11	16 Februari 2023	Demplot BBPPM Yogyakarta	Outing Class PAUD SPS Mutiara Bunda, Condongcatur	35 siswa	PAUD SPS Mutiara Bunda
12	16 Februari 2023	Gedung Sapu Jagat Desa Keputran Klaten	Musdes Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Tahun 2022		BPD Desa Kaputran
13	17 Februari 2023	Ruang Rapat Wakil Bupati Kab. Magelang	Rakor tindak lanjut pengajuan proposal matching fund tahun anggaran 2023	25 orang	Pemerintah Kab. Magelang
14	18-19 Februari 2023	BBPPM Yogyakarta	Kunjungan Demplot dari Alumni Pelatihan KPMD Angkatan 12 dan 13 Tahun 2018	8 orang	Alumni KPMD
15	20 Februari 2023	Balai Kalurahan Tirtosari, Kretek	Narasumber Peningkatan Kapasitas LPMK Kalurahan Tirtosari	15 orang	Dinas PMK Kab. Bantul
16	20 Februari 2023	Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya	Narasumber Pelatihan BUM Desma		Dinas PMK Kab. Bantul
17	21 Februari 2023	Bangsas Rumah Dinas Bupati Bantul	Narasumber Pelatihan BUM Desma		Dinas PMK Kab. Bantul
18	22 Februari 2023	Ruang Sidang Dekanat UNY	Koordinasi Pengembangan Desa Binaan Kampung Emas Krapyak, Seyegan		UNY
19	25 Februari 2023	Balai Kalurahan Jagalan, Banguntapan	Narasumber Peningkatan Kapasitas LPMK Kalurahan Jagalan	15 orang	Dinas PMK Kab. Bantul

20	27 Februari 2023	Aula Srikandi BBPPM Yogyakarta	Pemandu Dinamika Kelompok Bimtek Satpol PP Kab Magetan		Kab Magetan
21	28 Februari 2023	Disnakertrans Prov Jateng - Semarang	Narasumber Program Pelatihan Catrans (Rakoord Ketransmigrasian)		Disnakertrans Prov Jateng
22		Aula Arjuna BBPPM Yogyakarta	Webinar Angkringan (Klinik BUMDesa) : Kebijakan Terkini Bumdesa bersama oleh Bu Dirjen PEI	150 Daring + 50 Luring	BBPPM Yogyakarta

c. Bulan Maret

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	7 Maret 2023	BBPPM Yogyakarta	Kunjungan KWT Sarwoendah Kal Margomulyo Kab Sleman	15	KWT Sarwoendah
2	8 Maret 2023	Kal Temuwuh, Dlingo, Bantul	Narasumber kegiatan peningkatan kapasitas LPM Kal (LKD)	20	Dinas PMK Kab Bantul
		BBPPM Yogyakarta	Raker dan Pelantikan Pengurus Asosiasi Bumkalma LKd Kab Sleman	60	Forkom Bumdesma Sleman
3	9 Maret 2023	Kapanewon Sleman	Narasumber Bimtek peningkatan kapasitas pengelola BUMKal & Sosialisasi pembentukan BUMKal Kap Sleman		Dinas PMK Kab Sleman
		Dinas PMD Kab Kendal	Kegiatan Desiminasi Penyelenggaraan Pelatihan Bumdesa di Kab Kendal		Diri Sendiri
		Kal Margoagung, Sleman	Kunjungan ke Kampung Emas Kal Margoagung, Sleman	1 desa	Rektorat UNY
4	10 Maret 2023	BBPPM Yogyakarta	Benchmarking Pengelolaan Pelatihan BUMDesa Dinas PMD & DPRD Prov Kalsel	12	Dinas PMD Prov Kalsel
5	10- 11 Maret 2023	Demplot BBPPM Yogyakarta	Peningkatan kapasitas TKM & Kunjungan Demplot Pemanfaatan Lahan Pekarangan	70 orang	Diskop, UMKM & Naker Kab Pekalongan

6	13 Maret 2023	Kapanewon Tempel	Narasumber Bimtek peningkatan kapasitas pengelola BUMKAL & Sosialisasi pembentukan BUMKAL Kap Tempel		Dinas PMK Kab Sleman
		Bumkalma Sumbarinten Ponjong LKd, Gunung Kidul	Narasumber Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bumdesma Sumbarinten Ponjong LKd (Materi Lap Keuangan & Perpajakan)		Bumdesma Sumbarinten Ponjong Lkd
7	15 Maret 2023	Kapanewon Godean	Narasumber Bimtek peningkatan kapasitas pengelola BUMKAL & Sosialisasi pembentukan BUMKAL Kap Godean		Dinas PMK Kab Sleman
		Demplot BBPPM Yogyakarta	Kunjungan PWRI Kapanewon Depok ke Demplot BBPPM Yogyakarta	35 orang	PWRI
		Best City Hotel Yogyakarta	Narasumber Tata Kelola BUM Desa di Best City Hotel Bumijo Yogyakarta		BUMDesa Kec Klaten Selatan
8	20 Maret 2023	BBPPM Yogyakarta	Peserta Mini Games/Out bond Program Magang Mahasiswa UNY	20 orang	Mahasiswa Magang UNY
9	24 Maret 2023	Klinik Bumdesa BBPPM Yogyakarta	Studi Referensi Penyusunan Perda Bumdes oleh Pansus DPRD Kab Kebumen	14 orang	Pansus Bumdesa DPRD Kab Kebumen
10	24 s.d 27 Maret 2023	Hotel Garden Palace Surabaya	Undangan Fasilitator Bimbingan Teknis Kader Digital Desa Cerdas Fase II Regional Surabaya		BPI Kemendesa
11	27 s.d 29 Maret 2023	Hotel Garden Palace Surabaya	Undangan Fasilitator Bimbingan Teknis Kader Digital Desa Cerdas Fase II Regional Surabaya		BPI Kemendesa
12	27 s.d 29 Maret 2023	Hotel Garden Palace Surabaya	Undangan Fasilitator Bimbingan Teknis Kader Digital Desa Cerdas Fase II Regional Surabaya		BPI Kemendesa

d. Bulan April

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	Pembahasan Draft Perda tentang BUMDesa Kab Kebumen	5 April 2023	DPRD Kab Kebumen	20 orang	DPRD Kebumen

2	Mengajar Secara Online terkait Desa Cerdas	10 April 2023	BBPPM Yogyakarta	100 orang	BPI Kemendesa PDTT
3	Angkringan Klinik BUM Desa Reborn Ngabuburit : Praktek Baik BUM Desa secara online	12 April 2023	BBPPM Yogyakarta	20 orang	BBPPM Yogyakarta
4	Pendampingan Kal Mororejo Kec Tempel Kab Sleman (terkait pengelolaan sampah)	18 April 2023	Kalurahan Mororejo Kec. Tempel - Sleman	20 orang	Kalurahan Mororejo
5	Kunjungan kerja Pengelolaan Demplot dari Puslat SDM dan BBPPMD Jakarta	13 April 2023	BBPPM Yogyakarta	20 orang	Puslat SDM

e. Bulan Mei

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	Sidang Senat dan Dies Natalis Untidar ke 44	2 Mei	Universitas Tidar Magelang		Untidar
2	Penguatan Kapasitas kelembagaan BUMDesa di Kap Moyudan	11 Mei 2023	Kantor Kapanewon Moyudan	20 orang	Kapanewon Moyudan
3	Peningkatan Kapasitas LKD dan BUMDesa Desa Banjarkawung -Brebes	13 Mei 2023	Hotel Next Jl Laksda Adisucipto KM 8, Janti Yogyakarta	45 orang	Pemdes Banjarkawung
4	Monev Hasil Penelitian, Program Pengabdian Masyarakat KKN dan Bhakti Sosial Dies Natalis ke 59 Universitas Negeri Yogyakarta	13 Mei 2023	Kampung Emas Margoagung		UNY

5	Studi Tiru Pengelolaan Hasil Panen dalam rangka Ketahanan Pangan yang diikuti oleh Pemdes, BPD, LPM, Kader PKK, RT RW	26 Mei 2023	BBPPM Yogyakarta	120 orang	Pemdes Trowulan - Mojokerto
6	Go Ekspose Mahasiswa Magang UNY	29 Mei 2023	BBPPM Yogyakarta	6 orang	BBPPM Yogya
7	Narasumber Pordes Live Podcast Rembug Desa Sinergi Pendampingan secara online	30 Mei 2023	BBPPM Yogyakarta		BBPPM Yogya
8	Pemantapan Studi Alumni Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Sidoarjo	31 Mei 2023	BBPPM Yogyakarta	30 orang	Alumni Pelatihan Pengelolaan BUM Desa

f. Bulan Juni

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	Peserta Bimtek Aplikasi Keuangan	6 - 8 Juni 2023	SMP N 1 Sleman		STAN dan Pemerintah Sleman
2	Pembekalan Pensiunan Pemkot Yogyakarta	13 Juni 2023	Demplot BBPPM Yogyakarta	75 orang	BKAD Pemkot DIY
3	BKAD Kecamatan Adiwerna Kab Brebes	23 - 24 Juni 2023	BBPPM Yogyakarta		BKAD Kab Brebes
4	Diskusi Muda Membara dengan tema "Optimalisasi Program Kuliah Kerja Nyata Untuk Mewujudkan Kemandirian Desa"	30 Juni 2023	BBPPM Yogyakarta	150 orang	Universitas Negeri Yogyakarta

g. Bulan Juli

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes Kec Tongas Kab Probolinggo	1 Juli 2023	BBPPM Yogyakarta	90 orang	BKAD Kec Tongas Kab Probolinggo
2	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesMa Kepmendesa 136	6 s.d. 7 Juli 2023	BBPPM Yogyakarta	80 orang	BUMDesma LKd Kec Susukan Kab Banjarnegara
3	Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Kab. Tebo Provinsi Jambi	7 Juli 2023	BBPPM Yogyakarta	70 orang	BPD Kab Tebo, Jambi
4	Pendampingan KKN Mahasiswa UNTIDAR Magelang	10 Juli 2023	Desa di Kab Magelang (4 Desa)	70 orang	UNTIDAR
5	Kunjungan Forum Bumdesma Lkd Wonogiri terkait Lap Keu Kepmendesa 136	12 Juli 2023	Klinik Bumdesa BBPPM YK	6 orang	Forum Bumdesma Lkd
6	Kunjungan Karang Taruna Adikarto, Muntilan dan Belajar Kilat ke Demplot	13 Juli 2023	Kelas B BBPPM Yogyakarta	6 orang	Karang Taruna Adikarto
7	Studi Eksekursi Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW terkait pemberdayaan masyarakat desa dan kunjungan ke Demplot	20 Juli 2023	BBPPM Yogyakarta	57 orang	Universitas Kristen Satya Wacana
8	TOT Pasca bencana bagi PD PLD untuk Kab Bantul dan Kab Sleman	26 s.d 27 Juli 2023	BBPPM Yogyakarta	100 orang	Ditjen PDP Kemendesa

h. Bulan Agustus

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	Sharing Informasi bagi TPP dalam Rapat Sinergisitas Pendampingan Masyarakat Desa di DIY	2 Agustus 2023	Hotel Premiere HOME Timoho	50 orang	P3MD BPSDM
2	Narasumber materi Business Plan & Lap Keu kegiatan PEI	7 s.d. 9 Agustus 2023	Kendari, Sulawesi Tengah		Ditjen PEI
3	Pembicara Pengelolaan Potensi Desa dalam Rangka Persiapan Dusun Bangunmulyo menjadi Desa Wisata	8 Agustus 2023	Bangunmulyo, Girikerto, Turi , Sleman	20 orang	Tim KKN UNY Dusun Bangunmulyo
4	Narasumber Bimtek Peningkatan Kapasitas BUM Desa bersama	10 Agustus 2023	Aula Kantor Dinas PMD Kab Wonogiri		Dinas PMD Kab Wonogiri
5	Pendampingan Kegiatan Jejaring Desa Cerdas ke Gunung Kidul	12 Agustus 2023	Gunungkidul		BPI Kemendesa
6	Pengajar Kegiatan Refreshment Training Penguatan Partisipasi Pegiat Desa - P3PD	19 s.d 21 Agustus 2023	Hotel Harris Semarang	100 orang	P3MD BPSDM-P3PD
7	Narasumber Pelatihan SDM/Pelaku Desa Wisata (Deswita Surjan Kal Pleret)	22 Agustus 2023	Kalurahan Pleret Panjatan Kulonprogo		Univ Janabadra
8	Peserta Dialog PengembanganBisnis Kelompok Perhutanan Sosial	24 s.d 25 Agustus 2023	The Alana Hotel Yogyakarta		Badan Pengelola Dana Lingkungan Kemenkeu
9	Peserta MOT Produksi Video Pembelajaran P3PD Sub Komponen 2c.1	25 s.d 29 Agustus 2023	Grand Paragon Hotel		Puslat SDM-BPSDM

10	Peserta Bimtek OVP Akademi Desa	28 s.d 31 Agustus 2023	Bali		Puslat SDM-BPSDM
11	Peserta Peringatan Hari Keswadayaan Masyarakat	28 s.d 29 Agustus 2023	Operational Room Kemendesa Jakarta		PPJF

i. Bulan September

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	Peningkatan Kapasitas Bumkalma Prambanan (Mengembangkan Usaha)	6 September 2023	Kalasan	60 orang	Bumkalma Prambanan
2	Peningkatan Kapasitas terkait Pasar Desa	12 September 2023	Kal Potorono Bantul	60 orang	Dinas PMD Kab Bantul
3	Pelatihan Catrans Kota Yogya (Pengelolaan Lahan Kering)	13 September 2023	Disnaker Kota Yoga	8 orang	Disnakertrasns Kota YK
4	Peningkatan Kapasitas terkait Pasar Desa	14 September 2023	Kal Sitimulyo Bantul	60 orang	Dinas PMD Kab Bantul
5	Praktik Catrans Kota	15 September 2023	Demplot BBPPM Yogyakarta	8 orang	Disnakertrasns Kota YK
6	Peningkatan Kapasitas Bumdesma Kab Karanganyar	18 September 2023	Syariah Hotel Solo	120 orang	Dinas PMD Kab Karanganyar
7	Peningkatan Kapasitas Bumdesma Kawasan (Rintisan) Management dan Marketing	25 September 2023	BBPPM Yogyakarta	60 orang	Dinas PMD Kab Rembang

j. Bulan Oktober

No	Tanggal	Tempat	Kegiatan	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	6 Oktober 2023	Kal Nglegi, Pathuk, Gunungkidul	Pelatihan Desa Cerdas (Digital Marketing)		Ruang Komunitas Digital Desa
2	6 Oktober 2023	BBPPM Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa terkait Pengelolaan Aset Desa	65	BKAD Kec Gending Kab Probolinggo
3	12 s.d 15 Oktober	Hotel Swiss Bell, Ambon	MOT Penguatan BUM Desa (Program TEKAD)		TEKAD- PEI
4	16 s.d 22 Oktober 2023	Grand Diamond Hotel Yogyakarta	Penguatan Kapasitas PD & PLD di Yogyakarta		P3MD
5	20 Oktober 2023	BBPPM Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa & Kal terkait Perencanaan Desa & PKD	65	BKAD Kec Kraksaan Kab Probolinggo
6	20 Oktober 2023	Klinik BUMDesa BBPPM Yogyakarta	Kunjungan Dinas PMD dan Kajari Bengkulu Tengah terkait Pendirian Klinik BUM Desa di Bengkulu Tengah	3	Dinas PMD Bengkulu Tengah
7	24 Oktober 2023	Hotel Candisari, Kebumen	Peningkatan kapasitas Pengelola Bumdesa (Lap Keuangan)	52	Dinas DMD Kebumen
8	23 s.d 26 Oktober 2023	Banyumas	Onlive Video Platform Akademi Desa (STT Telkom Purwokerto)		P3PD
9	24 - 25 Oktober 2023	Hotel Mustika di Tuban	Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa di Kab Tuban		Dinas PMD Tuban
10	27 Oktober 2023	BBPPM Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas Sekdes terkait Tata Kelola Pemdes & BUM Desa	35	BKAD Kec Krejengan Kab Probolinggo
11	26 Oktober 2023	BBPPM Yogyakarta	Kegiatan Pembelajaran Kontekstual : Hidroponik	299	MAN III Sleman
12	27 Oktober 2023	Demplot BBPPM Yogyakarta	Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	60	GOW Kab Sleman

k. Bulan November

No	Tanggal	Tempat	kegiatan	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	4 Nov 2023	BBPPM Yogyakarta	Kunjungan Kades Se-Kab Blora	272	Pemkab Bojonegoro
2	8 November 2023	BBPPM Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes Jolotundo, Lasem, Rembang	50	Pemdes Jolotundo, Rembang
3	8 November 2023	BBPPM Yogyakarta	Penigkatan Kapasitas Aparatur Desa : Membaca SDGs Desa	30	BKAD Kec Menduran
4	8 November 2023	Klinik Bumdesa BBPPM Yogyakarta	Diskusi/Desiminasi dengan Dinas PMD dan TA Kab Klaten terkait Lap Keuangan (Kepmendesa No. 136 Tahun 2022)	12	Dinas PMD Klaten
5	10 November	Demplot BBPPM Yogyakarta	Kunjungan Dharma Wanita Kab Sleman	60	Dharma Wanita Kab Sleman
6	14 November 2023	Demplot BBPPM Yogyakarta	Kunjungan Petani TEKAD	103	PEI-TEKAD
7	21 November 2023	Fakultas FEB Univ Janabadra	Dosen Tamu Pelaksanaan Merdeka Belajar Fakultas Ekonomi Bisnis Univ Janabadra (Matkul Ekopar & Ekokraf) : Membangun Kemitraan		
8	21 November 2023	BBPPM Yogyakarta	Penguatan Pengelola BUM Desa Karya Mulia Desa Gading Kec Tugu Kab Trenggalek		
9	24 November 2023	BBPPM Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes Selogudig Wetan Kab Probolinggo	40	Pemdes Selogudig
10	25 November 2023	BBPPM Yogyakarta	Peningkatan SDM dalam rangka Pengenalan Bentuk Usaha Pedesaan Kekinian	36	Pemdes Mergayu, Bandung, Tulungagung
11	27 November 2023	BBPPM Yogyakarta	Peningkatan SDM BUM Desa Kab Blitar	60	Dinas PMD Blitar & Fak PN Unibraw

I. Bulan Desember

No	Tanggal	Tempat	kegiatan	Jumlah sasaran	Penyelenggara
1	4 Desember 2023	BBPPM Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Pemdes, BPD, BUMDesa) Karangnangka Kec Kedungbanteng di Kab Banyumas	60	Pemdes Karangnangka
2	5 Desember 2023	Univ Janabdra	Dosen Tamu Pelaksanaan Merdeka Belajar Fakultas Ekonomi Bisnis Univ Janabadra (Matkul Ekopar & Ekokraf) : Membangun Kemitraan		Univ Janabadra
3	6 Desember 2023	BBPPM Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Se Kec Besuk Probolinggo	20	BKAD Kec Besuk Probolinggo
4	7 Desember 2023	BUM Desa Bersama Kawasan Pedesaan Manunggal Jaya	Bimtek Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama Kawasan	70	Dinas PMD Kab Blitar
5	9 Desember 2023	BBPPM Yogyakarta	Fasilitasi Pelatihan KPMD Se-Kecamatan Pemalang	62	BKAD Kec Pemalang
6	9 Desember 2023	BBPPM Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes, LKD	50	Pemdes Pedeslohor, Adiwerna, Brebes
7	15 Desember 2023	BBPPM Yogyakarta	Kunjungan Desa Catakayam, Kec Mojowarno Kab Jombang (Pengelolaan BUMDesa terkait Sampah)	30	Pemdes Catakayam Jombang
8	16 Desember 2023	BBPPM Yogyakarta	Peningkatan Kapasitas SDM Bumdesa Guna Pembangunan Deswita	20	Pemdes Margomulyo Kab Bojonegoro
9	28 Desember 2023	Hotel Red Magetan	Desiminasi Kepmendesa 136 Tahun 2022 terkait Penyusuna Lap Keu Bumdesama Lkd	120	Forkom Bumdesma LKD Kab Ngawi

B. Kinerja Anggaran

1. Kinerja anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian kinerja anggaran BBPPM Yogyakarta berdasarkan IKU yang telah ditetapkan pada awal tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Tabel kinerja anggaran berdasarkan IKU

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	2,196,223,000	2,196,210,698	12,302
2	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	61,939,000	61,933,000	6,000
3	Jumlah Masyarakat Desa yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	527,358,000	527,348,941	9,059
4	Jumlah lembaga/desa yang mendapat fasilitasi dan pemberdayaan melalui pendampingan	350,440,000.00	350,439,441	559
5	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	-	-	-
6	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	28,070,000	28,068,914	1,086
7	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPM Yogyakarta dalam satu tahun	18,800,000	18,800,000	-
8	Jumlah Dokumen Perencanaan	5,190,000	5,190,000	-
9	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	20,700,000	20,700,000	-

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	SISA ANGGARAN
10	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPM Yogyakarta	-	-	-
11	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	6,815,907,000	6,815,885,844	21,156
12	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	23,181,000	23,176,000	5,000
13	Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	-	-	-
14	Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	3,463,188,000	3,460,616,237	2,571,763

2. Kinerja anggaran berdasarkan Komponen Rincian Output (KRO)

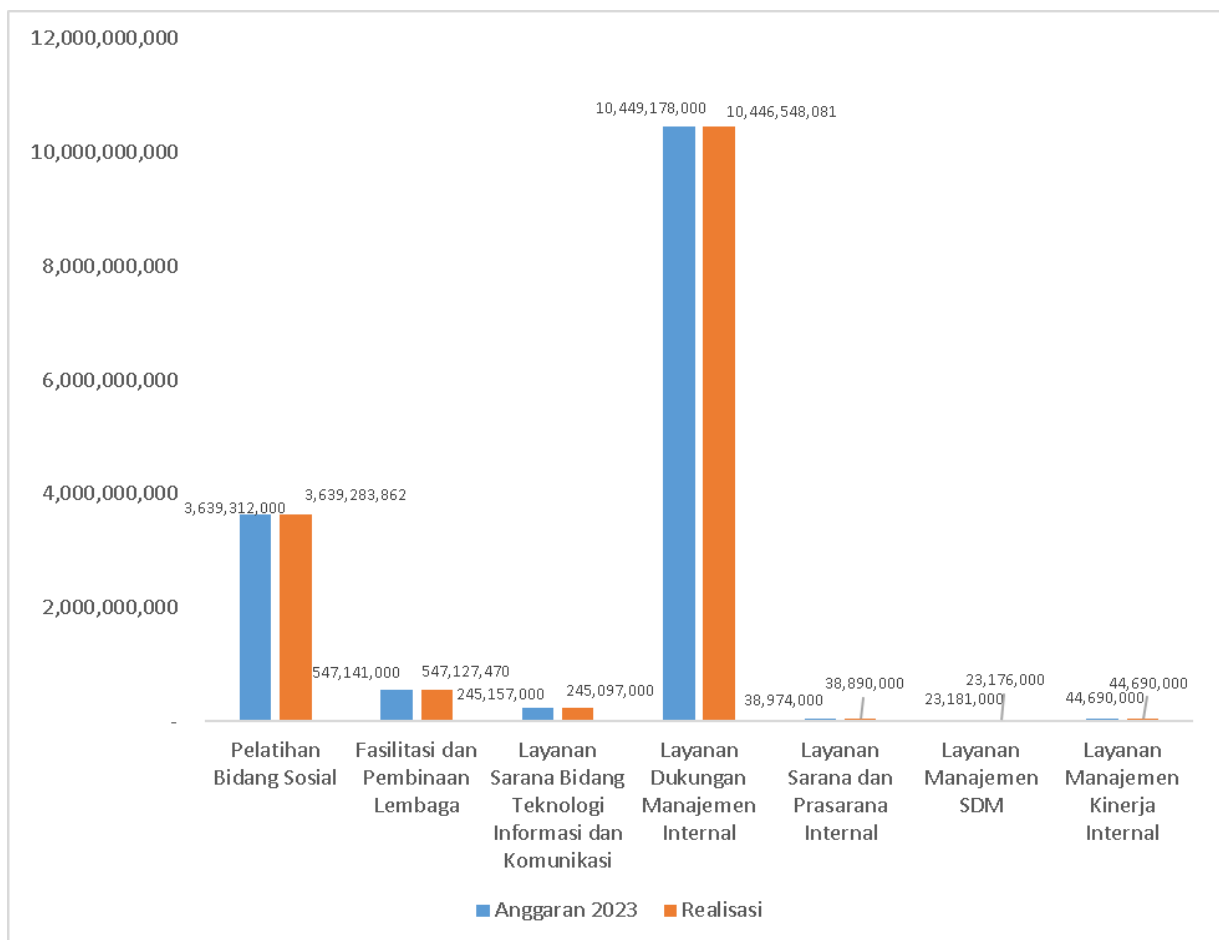
Secara garis besar program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 BBPPM Yogyakarta dapat diselenggarakan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Tabel perbandingan target dan realisasi kinerja anggaran

No.	IKU	Anggaran 2023	Realisasi	%	SISA
1	Pelatihan Bidang Sosial	3,639,312,000	3,639,283,862	100.00	28,138
2	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	547,141,000	547,127,470	100.00	13,530
3	Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	245,157,000	245,097,000	99.98	60,000
4	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10,449,178,000	10,446,548,081	99.97	2,629,919
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	38,974,000	38,890,000	99.78	84,000

6	Layanan Manajemen SDM	23,181,000	23,176,000	99.98	5,000
7	Layanan Manajemen Kinerja Internal	44,690,000	44,690,000	100.00	-
TOTAL		14,987,633,000	14,984,812,413	99.98	2,820,587

Grafik perbandingan target dan realisasi kinerja anggaran periode Tahun 2023 adalah :



Gambar 3. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Anggaran BBPPM Yogyakarta Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, dalam pencapaian sasaran program sesuai dengan indikator kinerja yang diperjanjikan oleh BBPPM Yogyakarta, alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 14.987.633.000,-

(Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). Adapun realisasi anggaran pada Tahun 2023 mencapai Rp. 14.984.812.413,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) atau sebesar 99,98% dengan persentase pencapaian fisik sebesar 100%.

Dalam Lampiran Hal III DIPA tercantum target realisasi anggaran sebesar 100% sehingga terdapat deviasi negatif sebesar 0,02%. Hingga akhir Desember sisa anggaran BBPPM Yogyakarta sebesar Rp. 2.820.587,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Target yang tercantum dalam Renstra BBPPM Yogyakarta Tahun 2020 – 2023

Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Target yang tercantum dalam Renstra BBPPM Yogyakarta Tahun 2020 – 2023

Sasaran Strategis BBPPM Yogyakarta	Indikator Kinerja BBPPM Yogyakarta		2020		2021		2022		2023	
			T	R	T	R	T	R	T	R
Terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat	120	120	1.815	1.485	1.830	240	1.830	780
Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	2	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat	60	60	685	95	270	134	270	250
	3	Jumlah Masyarakat Desa Yang Telah Difasilitasi Pelatihan dan Sertifikat Tahun 2023								
	4	Jumlah Lembaga/Desa Yang Mendapat Fasilitas dan Pemberdayaan Melalui Pendampingan								
Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan Melalui Pendampingan	5	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	0	0	0	0	50	52,5	85,00	88,42

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa terdapat beberapa IKU yang tidak sesuai dengan Renstra yakni :

1. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat ditargetkan sebanyak 1.830 orang, namun pada tahun berjalan hanya ditargetkan sebanyak 780 orang, hal ini dikarenakan pada saat penyusunan Renstra di awal periode tahun 2021 pelatihan dilaksanakan secara *Blended System (Online dan Offline)* dan alokasi memungkinkan untuk melaksanakan pelatihan dengan target orang sebanyak 1.815 orang. Dengan berpedoman pada tahun sebelumnya maka pada tahun 2022 ditargetkan jumlah peserta naik 10% dari tahun sebelumnya. Namun dikarenakan adanya *Automatic Adjustment* pelatihan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Oleh karena itu pada tahun 2023 realisasi kinerja tidak dapat diperoleh seperti target pada Renstra.
2. Jumlah Pelatihan Masyarakat Desa yang terdiri dari Pelatihan Calon Transmigran dan Pelatihan Kekhususan Balai (Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Produk) yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat dikarenakan adanya perubahan jumlah calon transmigran yang dilatih sehingga target IKU Tahun 2023 pada akhir tahun disesuaikan dengan capaian atau realisasi menjadi sebesar 20 orang dan Pelatihan Kekhususan Balai menjadi 230 orang.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BBPPM Yogyakarta Tahun 2023 disusun berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sampai dengan 29 Desember 2023. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DIPA Reguler mencapai keuangan sebesar Rp. 14.984.812.413,- (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah) atau sebesar 99,98% dengan persentase pencapaian fisik sebesar 100%. Dengan capaian keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan masih dalam ambang batas baik, dengan deviasi negatif sebesar 0,02% (batas deviasi yang ditetapkan Kementerian Keuangan maksimal adalah 5%).

Laporan Kinerja disusun untuk menggambarkan hasil kerja yang telah dicapai selama satu tahun anggaran, dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam rangka peningkatan kinerja unit kerja pada tahun yang akan datang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja melalui penyempurnaan terhadap penyusunan program kerja BBPPM Yogyakarta yang mengarah pada *input, output, outcomes, benefit* dari setiap kegiatan, sehingga pada tahun yang akan datang lebih efektif dalam pemanfaatan sumber dana dan sumber daya dapat ditingkatkan, yang didukung oleh kemampuan dan profesionalisme.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan BBPPM Yogyakarta tidak mengalami hambatan. Hal ini dapat diketahui dari capaian hasil evaluasi kinerja kegiatan diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar **100 %**.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Widarjanto**, Jabatan **Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta** menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Januari 2023

Menyaksikan:
Kepala BPSDM dan PMDDTT

Luthfiyah Nurlaela

Pembuat Pernyataan

Widarjanto



**PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widarjanto
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Luthfiyah Nurlaela
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Luthfiyah Nurlaela

Pihak Pertama,

Widarjanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA

A. Sasaran Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.1	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	780	Orang
2	Terlaksananya Pelatihan Masyarakat Desa	2.1	Jumlah Calon Transmigran yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	36	Orang
		2.2	Jumlah Masyarakat Desa yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat tahun 2023	204	Orang
3	Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan melalui Pendampingan	3.1	Jumlah lembaga/desa yang mendapat fasilitas dan pemberdayaan melalui pendampingan	3	Lembaga/ Desa
4	Terlaksananya pendampingan masyarakat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.1	Persentase alumni Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mampu melakukan pendampingan masyarakat	85	Persen
5	Terlaksananya kebijakan dan regulasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	5.1	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang dilaksanakan tahun 2023	0	Desa
6	Terpenuhinya dokumen pendukung yang disusun dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	6.1	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMDDTT Yogyakarta dalam satu tahun	12	Dokumen
		6.2	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Dokumen
		6.3	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan	23	Dokumen

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
		6.4	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMDDTT Yogyakarta	90	Persen
7	Terwujudnya Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPMDDTT Yogyakarta atas pelayanan dukungan manajemen	7.1	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	Bulan
		7.2	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75	Persen
		7.3	Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan
		7.4	Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan

B. Kegiatan dan Anggaran

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 3.850.000.000,- <i>(Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)</i>
2	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 10.843.649.000,- <i>(Sepuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 14.693.649.000,- <i>(Empat Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)</i>

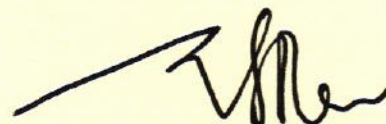
Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



Luthfiyah Nurlaela

Pihak Pertama,



Widarjanto



**PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cahyono
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Widarjanto
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Widarjanto

Pihak Pertama,

Cahyono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersusunnya dokumen pendukung dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.1	Jumlah Laporan Keuangan dan BMN BBPPMDDTT Yogyakarta dalam satu tahun yang tepat waktu	12	Dokumen
		1.2	Jumlah Dokumen Perencanaan tepat waktu	4	Dokumen
		1.3	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pemantauan tepat waktu	23	Dokumen
		1.4	Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPPMDDTT Yogyakarta optimal	90	Persen
2	Pelayanan Publik ASN lingkup BBPPMDDTT Yogyakarta yang optimal	2.1	Jumlah layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	12	Bulan
		2.2	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	75	Persen
		2.3	Jumlah Layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan
		2.4	Jumlah Layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	12	Bulan

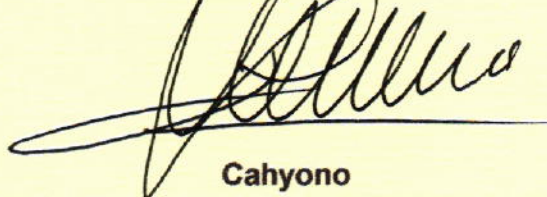
Yogyakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



Widarjanto

Pihak Pertama,



Cahyono



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Cahyono, Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha, menyatakan sebagai berikut:

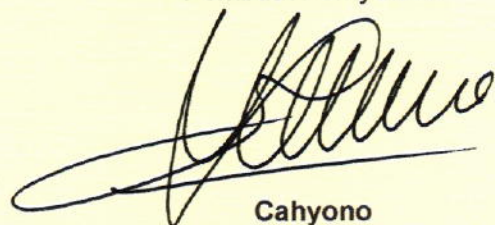
1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Yogyakarta, Januari 2023

Menyaksikan:
Kepala Balai

Widarjanto

Pembuat Pernyataan



Cahyono



**PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galuh Rahmi Pangesti
Jabatan : Kepala Sub Bagian Rencana, Program, dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cahyono
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

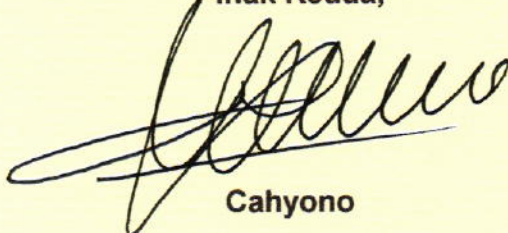
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



Cahyono

Pihak Pertama,



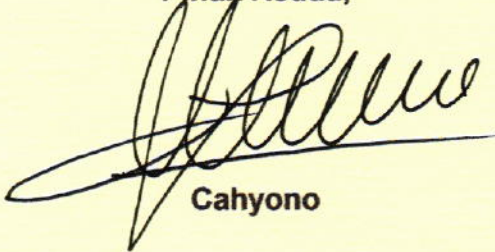
Galuh Rahmi Pangesti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dokumen perencanaan yang akuntabel	1.1	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	4	Dokumen
2	Dokumen evaluasi dan pemantauan yang akuntabel	2.1	Jumlah dokumen evaluasi dan pemantauan yang disusun tepat waktu	23	Dokumen
3	Terpenuhinya Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Optimal	3.1	Persentase Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Revisi DIPA dan Deviasi Halaman 3 DIPA yang optimal	90	Persen

Yogyakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



Cahyono

Pihak Pertama,



Galuh Rahmi Pangesti



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

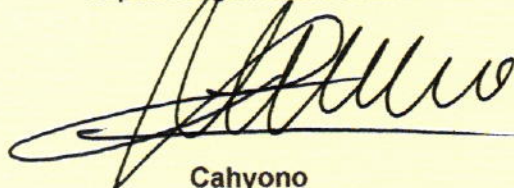
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Galuh Rahmi Pangesti**, Jabatan Kepala Sub Bagian Rencana, Program, dan Pelaporan menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya


Yogyakarta, Januari 2023

Menyaksikan:
Kepala Bagian Tata Usaha



Cahyono

Pembuat Pernyataan



Galuh Rahmi Pangesti



**PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Efi Sumarliningsih
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cahyono
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

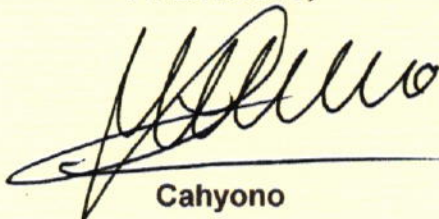
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

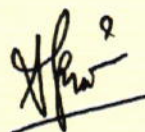
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,


Cahyono

Pihak Pertama,

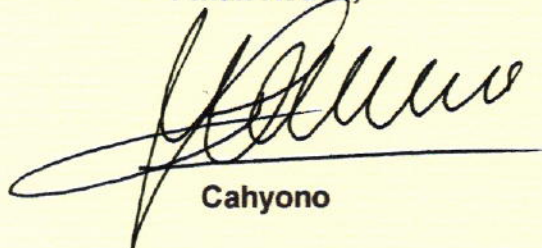

Efi Sumarliningsih

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya Laporan Keuangan dan BMN BBPPMDDTT Yogyakarta dalam satu tahun	1.1	Tersusunnya Laporan Keuangan dan BMN secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku	12	Dokumen
2	Terpenuhinya nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang optimal	2.1	Persentase nilai atas indikator kinerja pelaksanaan anggaran sesuai dengan ekspektasi	90	Persen
3	Tersedianya layanan gaji dan tunjangan pegawai selama 1 tahun	3.1	Terpenuhinya layanan gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	12	Bulan
4	Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian yang dapat diselesaikan selama 1 tahun	4.1	Layanan pengelolaan kepegawaian yang memuaskan dan dapat diselesaikan dengan baik	75	Persen
5	Tersedianya layanan persuratan dan pengelolaan arsip yang dikelola selama 1 tahun	5.1	Layanan persuratan dan pengelolaan arsip dikelola dengan baik dan tepat waktu	12	Bulan
6	Tersedianya layanan operasional dan pemeliharaan yang dikelola selama 1 tahun	6.1	Layanan operasional dan pemeliharaan memuaskan dan dikelola dengan baik	12	Bulan


Yogyakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



Cahyono

Pihak Pertama,



Efi Sumarliningsih



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

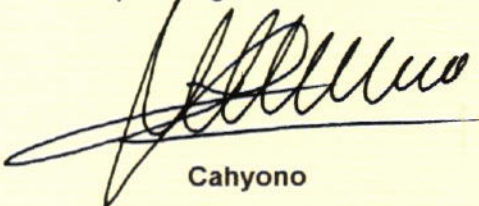
PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Efi Sumarliningsih**, Jabatan **Kepala Sub Bagian Umum** menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya


Yogyakarta, Januari 2023

Menyaksikan:
Kepala Bagian Tata Usaha



Cahyono

Pembuat Pernyataan



Efi Sumarliningsih